

**PARTISIPASI POLITIK ETNIS TIONGHOA DALAM PILKADA  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA DI  
KOMPLEK CEMARA ASRI TAHUN 2018**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S.I) Pada  
Program Studi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin Dan Study Islam  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara**

Oleh:

**NURUL QAMARIAH**

**44144029**



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**

**PERSETUJUAN**

**Skripsi Berjudul :**

**PARTISIPASI POLITIK ETNIS TIONGHOA DALAM PILKADA  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA DI  
KOMPLEK CEMARA ASRI TAHUN 2018**

**OLEH :**

**NURUL QAMARIAH**

**44.14.4.029**

**Dapat disetujui dan disahkan sebagai persyaratan untuk diujikan dalam Sidang  
Munaqasyah untuk memperoleh Gelar Sarjana S.1 pada Program Studi  
Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam  
UIN Sumatera Utara**

**Medan, 12Juli 2018**

**PEMBIMBING I**

**PEMBIMBING II**

**Prof. Dr. H. Katimin, M.Ag.**

**Muhammad Hidayat, M.A.**

**NIP.19650705 199303 1 003**

**NIP. 19770213 200710 1 001**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURUL QAMARIAH

N I M : 44.14.4.029

Prodi : Pemikiran Politik Islam

Judul Skripsi : **PARTISIPASI POLITIK ETNIS TIONGHOA DALAM  
PILKADA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA DI  
KOMPLEK CEMARA ASRI TAHUN 2018**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan yang semua telah saya jelaskan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini dijiplakkan, maka gelar dan ijazah yang diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Medan, 12 Juli 2018

Yang membuat pernyataan

NURUL QAMARIAH

NIM. 44.14.4.029

## ABSTRAK



Nama : Nurul Qamariah  
NIM : 44144029  
Program Studi : Pemikiran Politik Islam  
Fakultas : Ushuluddin Dan Studi Islam  
Judul Skripsi : **“Partisipasi Politik Etnis Tionghoa dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara di Komplek Cemara Asri Tahun 2018”**  
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Katimin, M.Ag.  
Pembimbing II : Muhammad Hidayat, M.A.

Skripsi ini mendeskripsikan tentang Bagaimana Partisipasi politik etnis Tionghoa dalam Pilkada (Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara) di tengah-tengah masyarakat Tionghoa di Komplek Cemara Asri, Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan. Kecenderungan ini dilatar belakangi Bangkitnya partisipasi dan soliditas pemilih dari etnis Tionghoa di Cemara Asri, selama ini orang Tionghoa dianggap sangat apolitis dan cenderung mengabaikan setiap pemilu, bahkan menghindari setiap aktivitas politik. Mereka lebih sibuk dan memfokuskan diri pada sektor ekonomi dan perdagangan.

Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif, instrumen pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi dan analisis data. Dapat dilihat penggunaan pendekatan metode penelitian ini di kaitkan dengan tujuan ingin mendeskripsikan dan mengetahui Partisipasi Politik Etnis Tionghoa Dalam Pilkada Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Di Komplek Cemara Asri Tahun 2018.

Peneliti menemukan Partisipasi Etnis Tionghoa dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Di Komplek Cemara Asri Tahun 2018. Masyarakat Tionghoa sadar akan tanggung jawab mereka sebagai warga negara Indonesia dan menggunakan Hak Pilihnya. Akan tetapi masyarakat Tionghoa di Komplek Cemara Asri ini masih bersifat sebagai pengamat. Mereka belum terlalu mengenal politik dan tidak ingin terjun ke dunia politik.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Puji Syukur Penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena dengan cucuran rahmat dan hidayah yang di berikan-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat di selesaikan, yang merupakan tugas akhir bagi penulis untuk menyelesaikan studi di Fakultas Ushluddin dan Studi Islam UIN-SU Medan. Sholawat dan salam juga kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan yaitu keislaman dan semoga kita nanti mendapatkan syafa'atnya di yaumul akhir kelak.

Teristimewah ungkapan syukur dan terima kasih tidak terhingga peneliti persembahkan kepada kedua orang tua peneliti, ayahanda **Muhammad Samin** dan Ibunda Tercinta **Jaminah**, melalui bimbingan, dekapan kasih sayang dan doa restu merekalah skripsi ini dapat terselesaikan.

Dalam hal ini juga dengan tulus hati peneliti mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga terhadap semua pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, teristimewa kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. H. Saidurrahman, M.Ag** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak **Prof.Dr. Katimin M.Ag** sebagai dekan Fakultas Ushluddin dan Studi Islam beserta Bapak/ Ibu Dosen yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas belajar kepada penulis.
3. Bapak **Drs. Muhammad Aswin, M.AP** selaku ketua jurusan Program Studi Pemikiran Politik Islam UIN SU, beliau selalu membimbing kami dan selalu mengarahkan kami.

4. Bapak **Muhammad Hidayat, M.A**, selaku sekretaris jurusan Program Studi Pemikiran Politik Islam UIN SU, beliau selalu membimbing kami dan selalu mengarahkan kami.
5. Ibu **Dra. Elly Warnisyah Harahap, M.A**, selaku Kepala Bagian Lap Program Studi Pemikiran Politik Islam, beliau selalu memberi saran dan nasehat bagi peneliti.
6. Kepada pihak **Kantor Desa Sampali**, terima kasih sebesar-besarnya atas bantuannya memberikan waktu dan kesempatan mengijinkan peneliti meneliti.
7. Kepada kakanda tercinta **Jamilah, Susilawati Samin, Ati Rosmiati, Indah Sumaya, Siti Fatimah** yang selalu memberikan dukungan, semangat sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada adinda tercinta **Muhammad Jainul Fazri, Fahrul Lutfi, jauharotul Mila, Maulana Muhammad Husein** yang selalu menghibur penulis di sela-sela rasa kelelahan muncul sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada keluarga dari pihak Ayah dan Ibu yang terus memberikan motivasi dan dukungan sehingga peneliti menjadi semangat dalam menggapai cita-cita.
10. Terima kasih kepada sahabat terindah peneliti **Muhammad Irfan** yang tidak pernah bosan memberikan semangat terhadap peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan **Maulida, Aisyah Natasyah Lubiss, Yayank Dwi Utari, Sari Fatimah Azzahrah Marpaung**, dan semua yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu baik PPI-A maupun PPI-B.

Penulis menyadari bahwa terdapat kekurangan dalam menyusun dan penulisan skripsi ini, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis

mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis mengharapkan semoga penelitian ini berguna dan bermanfaat bagi pengembangan khasanah dunia politik.

**Medan, 12 Juli 2018**

**Nurul Qamariah**

**44144029**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Batasan Istilah .....	9
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Kegunaan Penelitian.....	10
F. Kajian Terdahulu.....	11
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Pembahasan .....	17
 <b>BAB II KAJIAN TEORITIS.....</b>	 <b>18</b>
A. Partisipasi Politik .....	18
B. Pemilihan Umum Kepala Daerah.....	29
C. Orang Tionghoa .....	32
D. Sejarah Etnis Tionghoa Dalam Politik.....	35
 <b>BAB III DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN .....</b>	 <b>46</b>
A. Demografi Wilayah.....	46
B. Jumlah Penduduk dan Tingkat Ekonomi Penduduk .....	47
C. Pemerintahan.....	50
D. Pendidikan.....	50
E. Agama dan Lembaga Keagamaan.....	51
F. Seputar Komplek Cemara Asri .....	52



<b>BAB IV PARTISIPASI POLITIK ETNIS TIONGHOA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KOMPLEK CEMARA ASRI TAHUN 2018 .....</b>	<b>54</b>
A. BentukPartisipasiPolitik di TionghoaDalamPemilihanKepala Daerah di KomplekCemaraAsri .....	54
B. PartisipasiPolitikMasyarakatTionghoaDalamPilkadaTahun 2018.....	60
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran-Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 : Perolehan Suara TPS 5, 6, 7, dan 8 Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara 2018 di Cemara Asri .....	5
Tabel 2 : Rata-rata Jumlah Hari Hujan dan Curah Hujan Menurut Bulan di Kecamatan Percut Sei Tuan, 2016 .....	38
Tabel 3 : Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin .....	39
Tabel 4 : Jumlah Penduduk 15 tahun ke-atas Menurut Pekerjaan Desa Sampali .....	40
Tabel 5 : Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Klamín Kecamatan Pecut Sei Tuan 2016 .....	40
Tabel 6 : Lembaga Keagamaan di Komplek Cemara Asri .....	42

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 : Piramida Partisipasi Politik .....	25
---	----

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Salah satu bentuk partisipasi politik dalam kehidupan bernegara adalah peran serta masyarakat dalam pemilihan umum. Yang dimaksud masyarakat disini adalah warga Negara yang secara peraturan perundang-undangan memiliki hak suara dalam pemilihan umum tanpa memandang agama, etnis ataupun yang lainnya.

Dalam suatu sistem politik demokrasi, kehadiran pemilu yang bebas dan adil (*Free and fair*) adalah suatu keniscayaan. Bahkan, sistem politik apapun yang diterapkan oleh suatu negara, seringkali menggunakan pemilu sebagai klaim demokrasi atas sistem politik yang dibangunnya. Sistem demokrasi liberal, sistem komunis, atau sistem otoriter sebagaimana yang banyak diterapkan di beberapa negara dunia ketiga, hampir semuanya telah melakukan pemilu secara Internasional. Oleh karena itu, bisa dipahami jika banyak ilmuwan politik yang menggunakan pemilu sebagai tolak ukur pelaksanaan demokrasi di suatu negara.<sup>1</sup>

Keberadaan pemilu sebagai parameter demokrasi bukanlah terletak pada dan tidaknya pemilu, namun lebih pada tingkat pelaksanaan pemilunya. Artinya, semakin pemilu itu dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, seperti yang dijalankan secara *free and fair*, maka semakin demokratis suatu negara. Betapapun begitu harus disadari bahwa pemilu bukanlah satu-satunya tolak ukur tegaknya sistem politik demokrasi. Sebab, disamping adanya pemilu yang bebas dan adil, demokrasi membutuhkan persyaratan-persyaratan lain diantaranya adalah akuntabilitas pemerintah kepada lembaga perwakilan rakyat (DPR), kebebasan menyuarakan pendapat dan berorganisasi, dan sebagainya.<sup>2</sup>

Ada beberapa alasan mengapa pemilu sangat penting bagi kehidupan demokrasi di suatu negara, khususnya di negara-negara dunia ketiga. *Pertama*, pemilu memungkinkan

---

<sup>1</sup>Muhamad Asfar, *Pemilu Dan Prilaku Pemilih 1955 dan 2004*.(Surabaya: Pustaka Eureka, 2006),h 3.

<sup>2</sup>Rusli Karim, *Tinjauan Global: Demokrasi menjelang Abad ke-21*,dalam *jurnalUnisia*,No. 36, 1998, h. 34.

suatu komunitas politik melakukan transfer kekuasaan secara damai. Sejarah mencatat, tidak jarang peralihan kekuasaan yang dilakukan di luar sarana pemilu menyebabkan terjadinya kekacauan dan pertumpahan darah. Beberapa negara yang melakukan transfer kekuasaan melalui kudeta biasanya (cendrung) menyebabkan adanya kudeta pada kekuasaan transfer kekuasaan berikutnya. Oleh karena itu, agar proses pergantian kekuasaan dapat berjalan baik dan damai, diperlukan adanya seperangkat aturan main yang memungkinkan hal itu terjadi, dan dalam persepektif kehidupan politik modern, jalan satu-satunya yang paling mungkin adalah pemilu yang bebas dan jujur (jujur dan adil).

*Kedua*, melalui pemilu akan terciptanya pelembagaan konflik. Diakui atau tidak, sistem demokrasi menuntut adanya kebebasan menyuarakan kepentingan dan konflik secara terbuka. Bahkan, Prezeworski<sup>3</sup> mencatat, demokrasi itu sendiri merupakan hasil kontingen dari konflik. Permasalahannya adalah penyelesaian konflik-konflik itu, khususnya yang berkaitan dengan konflik memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan, diselesaikan melalui lembaga-lembaga demokrasi yang ada. Adanya pemilu secara bebas dan adil, memungkinkan pihak-pihak yang berkonflik menahan diri dan memanfaatkan pemilu sebagai sarana untuk berkonflik, sebab kelompok-kelompok non penguasa, khususnya para oposisi, yang ingin mengganti pemerintah akan memusatkan tenaganya untuk menghadapi pemilu dan bukannya menyerang pemerintah melalui kekuatan fisik. Selanjutnya, pihak penguasa bisa melakukan konsolidasi kekuasaan untuk menghadapi penantangannya melalui pemilu dan bukannya menekan melalui kekerasan fisik dan senjata.

Permasalahan mengenai proses pelaksanaan pemilu yang benar-benar bebas dan adil, sebab, jika tidak maka terjadi protes masa untuk menentang penyelewengan dalam penyelenggaraan kekuasaan, yang juga tidak jarang dilakukan dengan cara-cara kekerasan. Banyak kasus menunjukan, fenomena munculnya kekerasan politik diseperti pemilu, tidak saja pemilu secara nasional akan tetapi pilukada sering terjadi.

قَالُوا يُسْعِيْبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَقُوْلُ وَاِنَّا لَنَرٰكَ فِيْنَا ضَعِيْفًا وَّلَوْ لَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنٰكَ وَمَا اَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيْزٍ

*Artinya:*

---

<sup>3</sup>Adam Prezeworski, *Democracy as a Contingent outcome of Conflict*, dalam Muhammad Asfar, *Pemilu Dan Prilaku Pemilih 1955 dan 2004*. (Surabaya: Pustaka Eureka, 2006), h.3-4.

*Mereka berkata: "Hai Syu'aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami; kalau tidaklah karena keluargamu tentulah kami telah merajam kamu, sedang kamupun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi kami"*

Secara konseptual, setidaknya terdapat dua mekanisme yang bisa dilakukan untuk menciptakan pemilu yang bebas dan adil. *Pertama*, menciptakan seperangkat metode atau aturan untuk mentransfer suara pemilih ke dalam suatu lembaga yang disebut Komisi Pemilihan Umum (KPU), baik pemilu yang dilakukan secara nasional maupun di tingkat lokal, dalam hal ini KPUD, atau yang oleh kalangan ilmuwan politik disebut sebagai sistem pemilihan (*Electoral system*). *Kedua*, menjalankan pemilu sesuai dengan aturan main dan prinsip-prinsip demokrasi, atau yang oleh kalangan ilmuwan politik disebut sebagai proses pemilihan (*Electoral process*).<sup>4</sup>

Sistem pemilihan adalah seperangkat metode yang mengatur warga negara dalam memilih para pemimpin atau wakilnya sebagai pengatur kekuasaan. Dalam lembaga perwakilan rakyat, seperti lembaga legeslatif DPR/DPRD, sistem pemilu bisa berupa seperangkat metode untuk mentransfer suara pemilih ke dalam suatu kursi di lembaga legislatif atau parlemen. Namun, ketika pemilihan itu terjadi pada seorang kepala pemerintahan sebagai representasi tunggal seperti presiden, gubernur, bupati/ walikota, dan sebagainya, sistem pemilihan itu bisa berwujud seperangkat metode untuk menentukan seorang pemenang berdasarkan jumlah suara yang diperolehnya.

Di Sumatera Utara Pilkada Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Utara di selenggarakan pada 27 Juli 2018 dengan diikuti dua pasang calon. *Pertama*, pasangan calon nomor urut 1 Edi Rahmayadi dan Musa Rejeksah dikenal dengan singkatan Ermas dan pasangan calon nomor urut 2 Djarot Saiful Hidayat dan Sihar Sitorus dikenal dengan singkatan Djos. Berdasarkan *quick count* LSI Denny JA dalam Pilkada Sumatera Utara, pasangan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah memperoleh suara terbanyak yaitu 57,7 % (persen) lebih unggul dari pasangan nomor urut 2 yang hanya memperoleh 42,93%.

---

<sup>4</sup>Muhammad Asfar, *Pemilu Dan Prilaku Pemilih 1955 dan 2004*, h. 4.

Berdasarkan rapat pleno KPU provinsi yang diselenggarakan pada 8 July 2018 mengumumkan bahwa pasangan nomor urut 1(Eramas).

Peristiwa yang sedikit menarik perhatian selama penulis mengadakan observasi lapangan pada tanggal 27 Juni 2018di komplek Cemara Asri, justru perolehan suara terbanyak di raih pada pasangan nomor urut 2 (Djoss) yang notabene merupakan basis suara Eramas.

**Tebel. 1**

**Perolehan Suara TPS 5, 6,7, dan 8 Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara 2018 di Cemara Asri**

T PS	Gubernur - Wagub – SU			
	S ah	Ko song	1. Eramas	2. Djoss
5	2 10	-	75	135
6	2 37	-	79	158
7	2 01	-	77	124
8	2 28	-	82	144
J umlah	8 76		563	876

Komplek Cemara Asri merupakan perumahan mewah yang terletak di jalan Boulevard desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Perumahan ini dibangun oleh seorang pengusaha yang terkenal H. Anif yang saat ini luas wilayah

komplek tersebut ± 430 ha. Mayoritas di huni oleh masyarakat Tionghoa, bahkan di dalam kompleks terdapat Vihara terbesar di Asia Tenggara yaitu, Maha Vihara Maitreya.

Hubungan politik antar etnis di Indonesia telah berjalan sejak adanya etnis di Indonesia. Hubungan politik selanjutnya diwarnai dengan persaingan politik yang sangat kental karena melibatkan persaingan politik antara kelompok ECI sebagai imigran di Hindia Belanda dan bangsa Belanda sebagai pihak yang hendak mendominasi kekuatan politik di Hindia Belanda. Menurut catatan sejarah, kasus politik imigran Cina telah dua kali melakukan langkah politik yaitu: *Pertama*, pada tahun 1740 terjadi pemberontakan masyarakat Tionghoa melawan Belanda di Batavia (sekarang bernama Jakarta) “mereka berhasil merebut posisi kompeni Belanda di Meester Cornelis dan Tanah Abang berhasil membunuh 50 orang serdadu kompeni. Kemudian kekuatan Tionghoa itu berhasil di bersihkan oleh Van Imhoff yang berkekuatan lebih dari 1.800 orang serdadu”<sup>5</sup>, *Kedua* pada tahun 1777 masyarakat Tionghoa mendirikan kerajaan kecil bagi masyarakat Tionghoa yang disebut Lanfang Gongheguo (“ Republik Lanfang”) <sup>6</sup> di Kalimantan Barat tepatnya di Mandor. Di era kemerdekaan Indonesia, Mandor menjadi wilayah Kabupaten Landak dan Menterado menjadi wilayah Kabupaten Sambas.

Semangat nasionalisme Cina di Indonesia ditandai juga oleh pembentukan sebuah organisasi dengan nama *Tiong Hoa Hwe Koan* (THHK) atau (Rumah Perkumpulan Tionghoa) pada tahun 1900. Pada tahun yang sama, Phoa Keng Hek, Presiden THHK, mengirimkan surat kepada komunitas Tionghoa yang menjelaskan pentingnya Konfusianisme dan alasan pendirian THHK. Pada saat itu ia dan anggota pelaksanaan juga mengingatkan kalangan Tionghoa untuk mendukung sekolah THHK Tionghoa yang akan mereka bangun. Untuk pertama kalinya, ada upaya yang dilakukan dengan sengaja untuk mengorientasikan kalangan Tionghoa Hindia Belanda terhadap Tiongkok <sup>7</sup>. Kemudian pada tahun 1901, didirikan sekolah yang menggunakan bahasa Cina sebagai bahasa pengantar (Tiong Hoa Hak

---

<sup>5</sup>Benny G. Setiono, *Tionghoa Dalam Pusaran Politik*, Trans Media Pustaka. Jakarta: 2008, h. 113.

<sup>6</sup>Benny G. Setiono, Hal. 189-195.

<sup>7</sup>Leo Suryadinata, *Pemikiran Politik Etnis Tionghoa Indonesia 1900-2002*, LP3ES. Jakarta: 2005 h.19.



Tong) di seluruh Jawa<sup>8</sup> dan diterbitkan surat kabar Tionghoa peranakan dalam bahasa Melayu Tionghoa, seperti Li Po (1901 di Sukabumi), *Chabar Perniagaan/Perniagaan* (1903 di Batavia), *Pewarta Soerabaia* (1902 di Surabaya), *Djawa Tengah* (1909 di Semarang)<sup>9</sup>.

THHK selanjutnya menjadi gerakan politik bagi orang Cina di Indonesia yang disebut Gerakan Cina Raya. Gerakan Cina Raya yang berkembang pesat yang berbentuk perkumpulan dagang yang disebut *Siang Hwee* (Kamar Dagang Tionghoa). Kamar dagang Tionghoa terbentuk di seluruh Jawa<sup>10</sup>. Dalam analisisnya, Leo Suryadinata mengatakan bahwa lahirnya Gerakan Cina Raya dan surat kabarnya merupakan produk nasionalisme di Cina. Setelah kemunculannya, Gerakan Cina Raya dan surat kabar itu mendorong rasa nasionalisme serta memperkuat perkembangan Gerakan Cina Raya, yaitu mempersatukan orang Tionghoa Hindia Belanda (dari berbagai kelompok) dan mengarahkan orientasinya secara kultural dan politik ke negeri Cina<sup>11</sup>.

Menurut Leo Suryadinata, pada tahap itu ada tiga aliran utama dalam dunia politik Tionghoa peranakan yang bekerja saling berdampingan. Ketiga aliran politik Tionghoa itu adalah Sin Po, kelompok Chung Hwa Hui (CHH), dan kelompok Partai Tionghoa Indonesia (PTI) yang didirikan pada tanggal 25 September 1932 oleh Liem Koen Hian, Ong Liang Kok, dan kaum peranakan lain di Surabaya, dengan disokong oleh Persatuan Bangsa Indonesia dan kaum nasionalisme Indonesia moderat lain, terutama dr. Soetomo dan Soeroso<sup>12</sup>.

Berdasarkan deskripsi di atas, penulis ingin meneliti lebih jauh tentang keterlibatan etnis Cina dalam Pilkada Kota Medan pada tahun 2018 di Komplek Cemara Asri, di samping itu juga topik mengenai keterlibatan Etnis Cina dalam politik sangat jarang ditemukan. Oleh karena itu hasil penelitian akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul ” ***Partisipasi Politik Etnis Tionghoa Dalam Pilkada Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Di Komplek Cemara Asri Tahun 2018***”

---

<sup>8</sup>Leo Suryadinata, *Politik Tionghoa Peranakan di Jawa*, Pustaka Sinar Harapan. Jakarta: 1994 h.23.

<sup>9</sup>Ibid, Leo Suryadinata, h. 23.

<sup>10</sup>Ibid, h. 23

<sup>12</sup> Leo Suryadinata, *Politik Tionghoa Peranakan di Jawa, 1917-1942*, Pustaka Sinar Harapan. Jakarta: 1994 (cetakan kedua), h. 86-87

## B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan penjelasan mengenai alasan mengapa masalah yang dikemukakan dalam penelitian itu dipandang menarik, penting dan perlu di teliti. Seperti yang dikemukakan di atas fokus kajian ini adalah: Bagaimana Partisipasi Politik Etnis Tionghoa Dalam Pilkada Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Di Komplek Cemara Asri Tahun 2018?

## C. Batasan Istilah

Untuk memudahkan pemahaman dan menghindari terjadinya kekeliruan dan kesalahan pemahaman dalam menginterpretasikan judul skripsi ini, maka diberikan batasan istilahnya sebagai berikut:

1. Masyarakat merupakan kata benda yang menunjukkan sejumlah kumpulan manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.<sup>13</sup> (Atau bisa juga dilihat menggunakan kamus Politik)
2. *Tionghoa*, merupakan sebutan bagi orang-orang atau masyarakat keturunan Cina yang tinggal di Indonesia. Sebutan Tionghoa disandarkan pada kata Tiongkok menunjukkan tempat tanah kelahiran. Dapat juga diartikan Cina perantau<sup>14</sup>
3. Keterlibatan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, (KBBI) di maknai dengan kata ke.ter.li.bat.an, *Nominal* (Kata Benda) keadaan terlibat: keterlibatannya mendandani para aktor/pelaku dimulai tak jauh dari awal kariernya pada tahun mulai berkarier<sup>15</sup>. jadi, yang dimaksud keterlibatan ialah keterlibatan atau para pelaku etnis cina dalam pemilu.
4. Etnis, adalah hubungan kekerabatan atau pertalian yang terdapat dalam sistem social dalam masyarakat dan memiliki kedudukan tertentu.<sup>16</sup>

Berdasarkan uraian judul tentang Partisipasi Masyarakat Tionghoa di Komplek Perumahan Cemara Asri dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubenur Sumatera Utara tahun

---

<sup>13</sup> Departemen Pemdikan dan Kebudayaan *Kamus Besar Bahasa Indonesia...* hal. 411

<sup>14</sup> Charles A. Coppel, *Tionghoa Indonesia Dalam Krisis*, Jakarta: Pustaka Sinar Haapan, 1994, hal. 19

<sup>15</sup> Departemen Pemdikan dan Kebudayaan *Kamus Besar Bahasa Indonesia...* hal. 411

<sup>16</sup> Departemen Pemdikan dan Kebudayaan *Kamus Besar Bahasa Indonesia...* hal. 411

2018 adalah peran serta atau keterlibatan masyarakat Tionghoa (etnis Cina) terhadap Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2018.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan di atas maka Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengetahui Partisipasi Politik Etnis Tionghoa Dalam Pilkada Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Di Komplek Cemara Asri Tahun 2018.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini untuk mengetahui tingkat Partisipasi Politik Etnis Tionghoa dalam Pilkada.
- b. Mengetahui secara geografis setatus sosial masyarakat Tionghoa di Komplek Cemara Asri.
- c. Untuk memperkaya khazanah kajian ilmu politik untuk pengembangan keilmuan, khususnya kalangan akademisi dan peneliti ilmu politik.

##### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Sebagai rujukan kepada masyarakat yang berminat dalam mengetahui partisipasi Tionghoa dalam pilkada di Komplek Cemara Asri
- b. Hasil penelitian ini nantinya juga diharapkan dapat menjadi rujukan dalam melakukan penelitian-penelitian yang serupa ditempat lain.

#### **F. Kajian Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar pijakan dalam rangka penyusunan penelitian ini. Kegunaan penelitian terdahulu untuk mengetahui hasil yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Secara umum penelitian tersebut menunjukkan informasi yang memberitahukan perlu adanya pembedaan antara penelitian yang telah selesai dilakukan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Adapun penelitian yang berhubungan dengan persepsi masyarakat Etnis Cina (tionghoa) diantaranya adalah:

### 1. Skripsi

Persepsi Etnis Tionghoa sebagai kelompok minoritas terhadap etnis non Tionghoa dalam politik multikulturalisme (studi kasus di kelurahan Metro, Penelitian ini ditulis oleh Dian Arisetya, yang diterbitkan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Lampung tahun 2015. Penelitian ini didasarkan pada teori Kymlika tentang studi studi *minority group*

### 2. Jurnal Ilmiah

Partisipasi Politik Etnis Tionghoa Dalam Pemilu tahun 2009 (Studi kasus desa Krangan Kec. Krangan Kab. Rembang), di tulis oleh Rizky Hani S.P. diterbitkan dalam Jurnal Paradigma, Volume 01 Nomor 01 tahun 2013, Universitas Negeri Surabaya. Dalam penelitian ini memuat partisipasi politik etnis Tionghoa dalam Pilkada tahun 2009, yang tergolong pasif dan sponsor dalam kampanye. Serta terdapat motif mereka melakukan partisipasi dan perubahan politik social kehidupan mereka terutama dalam aspek mobilitas.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang bersifat deskriptif bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian. misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara holistik dengan deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah<sup>17</sup>.

Hasil data yang diperoleh dari operasional metode kualitatif itu, kemudian oleh peneliti digunakan untuk keperluan analisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis. ada dua ciri metode deskriptif, yaitu: Pertama, memusatkan perhatian pada masalah yang ada pada saat penelitian yang dilakukan (saat sekarang) atau masalah yang bersifat aktual dan

---

<sup>17</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, PT. Remaja Rosdakarya. Bandung: 2004.

kedua, menggambarkan fakta tentang masalah yang sedang di selidiki sebagaimana adanya dirinya dengan interprestasi yang rasional dan memadai<sup>18</sup>.

Keterlibatan kelompok Cina dalam politik dan hubungan politik antaretnis di Indonesia secara generalisasi merupakan persoalan aktual untuk di selidiki lebih mendalam. Prosedur pemecahan masalah yang signifikan menggunakan Metode Deskriptif Analitis.

## **2. Lokasi Penelitian Dan Jadwal Penelitian**

Lokasi penelitian ini berada di Komplek Cemara Asri Di Kecamatan Percut Sei Tuan. Pertimbangan penetapan lokasi penelitian di Komplek Cemara Asri adalah sebagai berikut.

## **3. Sumber Data**

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat. Data ini diperoleh dari Kantor Desa, KPU, dan beserta Masyarakat Setempat di Komplek Cemara Asri Kecamatan Percut Sei Tuan. Komplek Cemara Asri merupakan perumahan yang dihuni mayoritas etnis Tionghoa dan memenangkan suara terbanyak oleh Paslon DJOSS (Djarot Saiful Hidayat dan Sihar P.H.Sitorus).
- b. Data sekunder adalah diperoleh dari buku-buku, internet, dan publikasi lainnya yang berkenaan dengan pembahasan penelitian ini (<http://deliserdangkab.bps.go.id>).  
BADAN PUSAT STATISTIK (BPS) KABUPATEN DELI SERDANG, JL. KARYA UTAMA KOMPLEK PEMKAB DELI SERDANG LUBUK PAKAM, KODE POS 20514/ TELP./ FAX 061-7951326.

## **4. Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Wawancara**

Wawancara adalah percakapan yang bertujuan untuk menggali informasi dari sampel peneliti, biasanya dilakukan antara dua orang atau lebih. Dengan demikian dalam sampel penelitian adalah masyarakat Tionghoa (keturunan Cina), yang bertempat tinggal di Komplek Perumahan Cemara Asri.

---

<sup>18</sup> Hadari Nawawi, *ibid*, hal. 64.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu tulisan atau catatan yang berupa laporan, arsip atau catatan lain yang dimiliki oleh lembaga pemerintah atau lembaga masyarakat. Teknik pengumpulan data dan informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti, yang dikaji dalam penelitian ini. Tujuannya untuk mendapatkan informasi yang mendukung analisis dan interpretasi, mengenai hasil pemilukada yang khususnya di Komplek Cemara Asri, Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan.

c. FGD (Focus Group Discussion)

Focus Group Discussion adalah metode pengumpulan data untuk memahami sikap dan perilaku khalayak. Biasanya terdiri dari 5-10 orang yang secara bersamaan dikumpulkan, diwawancarai dengan dipandu oleh moderator. Teknik pengumpulan data yang umumnya dilakukan pada penelitian kualitatif dengan tujuan menemukan makna sebuah tema menurut pemahaman sebuah kelompok. Teknik ini digunakan pemaknaan dari suatu kelompok berdasarkan hasil diskusi yang berpusat pada suatu permasalahan tertentu. Dimana metode penelitian menggunakan metode FGD yang mana penulis ingin mendapatkan informasi dari suatu kelompok tertentu yang sedang berkaitan.

d. Metode Analisis Data

Analisis Data merupakan suatu proses penyederhanaan data yang mudah dibacakan diinterpretasikan.. data yang dianalisis adalah data kualitatif yang diperoleh berdasarkan observasi terbatas, wawancara mendalam, dan studi literatur/kajian literatur. Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan laporan penelitian ini adalah metode perbandingan tetap (*constant comparative method*). Dinamakan metode perbandingan tetap atau *constant comparative method* karena dalam analisis data secara tetap peneliti membandingkan satu data dengan data yang lain, kemudian secara membandingkan satu kategori dengan kategori yang lain.

Secara umum, proses analisis data mencakup Reduksi Data, Klarifikasi, Sintesis, dan diakhiri dengan Penyusunan Kesimpulan Kerja. Untuk memperjelas proses analisis data, tahapan proses analisa data yang dimaksud di uraikan satu persatu berikut ini.

## **1. Reduksi data**

Identifikasi satuan (unit). Pada mulanya diidentifikasi adanya satuan, yaitu bagian terkecil yang ditemukan dalam data yang memiliki makna apabila dikaitkan dengan fokus dan masalah penelitian. Sesudah satuan diperoleh, langkah berikutnya membuat koding berarti memberikan kode pada setiap satuan supaya data/satuannya dapat ditelusuri asal dan sumbernya.

## **2. Klarifikasi**

Menyusun klarifikasi. klarifikasi adalah upaya memilah-milah setiap satuan kedalam bagian yang memiliki satuan. Kemudian, setiap pembagian tersebut diberi nama yang disebut label.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini ditulis dan disusun terdiri dari lima bab bahasan, dimana masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Hal ini dimaksudkan agar pembahasannya lebih terarah dan dapat dipahami dengan mudah. Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini kajian ini memuat: Latar Belakang, Batasan Istilah, Perumusan Masalah, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

## **BAB II KERANGKA TEORITIS**

Dalam bab ini kajian ini memuat: Pemilihan Umum Kepala Daerah, Partisipasi Politik, Budaya Politik, Perilaku Politik, dan Sikap Politik, Sejarah Masuknya Etnis Tionghoa di Indonesia, Peran Etnis Tionghoa dalam Politik Di Indonesia.

### **BAB III DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN**

Dalam bab ini kajian ini memuat: Keadaan Geografi Kelurahan Cemara Asri, Jumlah Penduduk dan Tingkat Ekonomi Penduduk, Tingkat Mata Pencaharian, Tingkat Pendidikan, Jumlah Penganut Agama dan Rumah Ibadah.

### **BAB IV PEMBAHASAN**

Dalam pembahasan ini mengulas temuan peneliti yang mencakup: wawancara dengan Masyarakat terkait Partisipasi Politik Etnis Tionghoa Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Komplek Cemara Asri Tahun 2018 dan Kencendrungan Partisipasi Politik masyarakat Tionghoa Dalam Pemilu pada Tahun 2018.

### **BAB V PENUTUP**

Meliputi kesimpulan dan saran-saran



## BAB II

### KAJIAN TEORITIS

#### A. Partisipasi Politik

##### 1. Defenisi Partisipasi Politik

Keikutsertaan warga negara atau masyarakat dalam suatu kegiatan politik, tidak terlepas adanya partisipasi politik dari masyarakat. Dimana masyarakat merupakan faktor terpenting dalam menentukan pemimpin pemerintahan baik di tingkat pusat sampai pada tingkat terendah yakni desa, maka dari itu peneliti akan menguraikan defenisi partisipasi politik itu sendiri.

Secara bahasa partisipasi adalah perihal turut serta dalam suatu kegiatan, atau peran serta.<sup>19</sup> Sedangkan politik secara etimologi berasal dari bahasa Yunani ”*Polis*” yang berarti kota atau negara kota dari polis timbul istilah lain *politie* yang berarti warga Negara. Menurut Meriam Budiardjo<sup>20</sup>, politik (*Politics*) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau Negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem dan melaksanakan tujuan-tujuan. Pengambilan keputusan (*decision making*) mengenai apakah yang menjadi tujuan dari system politik itu menyangkut seleksi terhadap beberapa alternative dan menyusun skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih. Sedangkan untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu perlu ditentukan kebijakan-kebijakan umum yang menyangkut pengaturan dan pembagian atau alokasi dari sumber-sumber yang ada.

---

<sup>19</sup>Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2007, edisi ketiha, h. 831

<sup>20</sup>Meriam Budardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002, h. 8

Menurut Ramlan Surbakti<sup>21</sup>, politik merupakan interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Oleh karena itu, secara jelas bahwa politik bersangkutan paut dengan soal-soal Negara dan pemerintah.

Demokrasi sebagai suatu system politik berupaya untuk memberikan tempat seluas-luasnya kepada rakyat untuk turut berpartisipasi atau ikut serta secara politik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini terlihat dalam proses pemilihan umum di tingkat lokal maupun nasional. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, diatur mengenai pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Sedangkan didalam UU No. 32 Tahun 2004, yakni UU No. 12 tahun 2008, Pasal 59 ayat 1 b, calon kepala daerah dapat juga diajukan dari calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.<sup>22</sup> Dengan demikian peran serta ataupun partisipasi politik masyarakat menutup kemungkinan munculnya kekuasaan yang bersifat otoriter atau anti demokrasi. Dibawah ini disajikan pendapat beberapa tokoh:

- a) Herbert McClosky dalam International Encyclopedia of the social Science:” Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui dimana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum.”<sup>23</sup>
- b) Samuel P. Huntington dan Joan Nelson dalam *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*.” Partisipasi politik adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk

---

<sup>21</sup>Ramlan Surbakti, *Memami Ilmu Politik*, Jakarta: Garsindo, 1999, h.1

<sup>23</sup>Herbert McClosky, *Political Participation: International Encyclopedia of the Social Science*, dalam Merriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik: suatu Pengantar* Jakarta: Rineka Cipta, 1990, h. 1.

memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir, atau spontan, damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.<sup>24</sup>

- c) Norman H. Nie dan Sidney Verba dalam *Handbook of Political Science: Partisipasi politik* adalah kegiatan pribadi warga negara secara legal yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk memengaruhi seleksi pejabat-pejabat Negara dan atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka.<sup>25</sup>
- d) Budiardjo mengartikan partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*publik policy*)<sup>26</sup> Kegiatan ini mencakup pemberian suara lewat pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*Contracting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya.

Berdasarkan beberapa definisi partisipasi politik di atas, terdapat hal substantif yang menjadi “rambu-rambu” berkenaan dengan partisipasi tersebut, yaitu:

- a) Kegiatan-kegiatan nyata. Partisipasi politik yang termasuk kegiatan-kegiatan nyata adalah kegiatan-kegiatan yang bisa diamati secara kasat mata, bukan sikap-sikap atau orientasi.
- b) Bersifat sukarela, yaitu kegiatan yang didorong oleh dirinya sendiri atau kesadaran sendiri (*self motion*), bukan di gerakkan oleh pihak lain, seperti bayang-bayang pihak pemerintah, desakan, manipulasi. Jika pemicunya adalah pihak lain, kecenderungannya bukan partisipasi politik, melainkan mobilisasi

---

<sup>24</sup>Samuel P. Huntington dan Joan Nelson dalam *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*, dalam Merriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik: suatu Pengantar*, h. 2

<sup>25</sup>Norman H. Nie dan Sidney Verba, "Handbook of Political Science Fred I. Grentein" dalam Merriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik: suatu Pengantar*, h. 1-2

<sup>26</sup>Merriam Budardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*,... h. 9

politik. Jika pemicunya kesadaran diri, hal tersebut merupakan partisipasi dalam pengertian otonom.

- c) Dilakukan oleh warga negara atau masyarakat biasa, baik individu maupun kelompok masyarakat. partisipasi politik yang dilakukan oleh warga atau masyarakat biasa ialah mengisyaratkan seolah-olah menutup rapat kemungkinan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh nonwarga negara biasa dalam kehidupan politik.
- d) Memiliki tujuan ikut serta dalam kehidupan politik, memengaruhi kebijakan pemerintah dan mencari jabatan politik. Tujuan tersebut adalah ikut serta dalam kehidupan politik sebagai penggerak untuk mendapatkan kesukarelaan dalam berpartisipasi. Bila tidak demikian, orang yang terlibat dalam kehidupan politik akan berada dalam keterpaksaan. Memiliki tingkatan-tingkatan partisipasi, yaitu keterlibatan individu-individu berbanding lurus dengan bentuk-bentuk partisipasi yang tersedia dalam sistem dan struktur politik yang ada. Dari yang paling bawah sampai tingkatan yang paling tinggi, dan dari paling luas cakupannya sampai yang paling sempit.
- e) Partisipasi politik merupakan usaha dari warga negara untuk mempengaruhi pemimpin pemerintahan serta adanya interaksi warga negara dengan pemerintah dalam menyampaikan semua kepentingan atau keinginan yang dibutuhkan oleh warga negara yang disampaikan pada pemerintah, sehingga kepentingan atau keinginan tersebut dapat terlaksana.

Dari berbagai definisi yang diberikan para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa konsep partisipasi politik mengacu pada kegiatan warga negara pada dua hal pokok yaitu proses pemilihan penguasa (pemerintah) dan pengawasan pada aktifitas penguasa yang terpilih. Aktifitas kedua ini berupa kegiatan mempengaruhi proses pengambilan keputusan (kebijakan). Setelah mengetahui konsep partisipasi politik tampak sederhana dan mudah dilakukan, maka partisipasi dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh para tokoh masyarakat/Muslim tokoh

agama pada hakikatnya adalah usaha menggali dan memberdayakan potensi-potensi yang dimiliki oleh tokoh atau masyarakat tersebut.

Dinegara-negara demokrasi umumnya dianggap bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat, lebih baik. Dalam alam pikiran ini, tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu,tingginya tingkat partisipasi juga menunjukkan bahwa rezim yang sedang berkuasa memiliki keabsahan yang tinggi. Dan sebaliknya, rendahnya perhatian warga terhadap masalah politik, selain itu rendahnya partisipasi politik juga menunjukkan lemahnya legitimasi dari rezim yang sedang berkuasa.

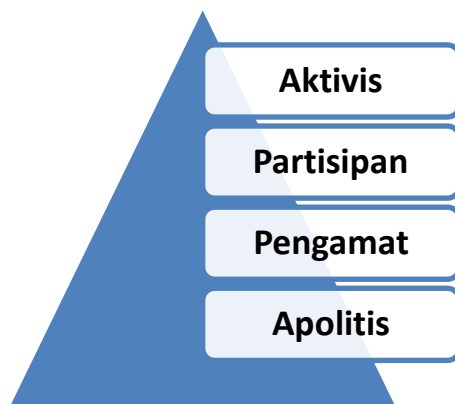
Setiap masyarakat yang sudah tinggal dan menetap di Indonesia serta sudah terdaftar menjadi warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk berpartisipasi politik di negara Indonesia tanpa memandang suku, agama, ras, maupun golongan tanpa terkecuali dimaksudkan disini ialah etnis Tionghoa. Melihat dari partisipasi politik etnis Tionghoa dari zaman ke zaman yang selalu berubah-ubah, sampai dimana era saat ini partisipasi maupun peran etnis Tionghoa diakui keberadaannya di negara Indonesia. Hal ini juga yang mendorong para warga etnis Tionghoa yang saat ini semakin menunjukkan eksistensinya dalam berpartisipasi politik, seperti salah satu contohnya ikut memilih dalam suatu pemilihan umum, baik itu pemilihan presiden maupun pemilihan kepala daerah.

Ada berbagai macam faktor maupun alasan mengapa para warga etnis Tionghoa ikut serta dalam suatu Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah, faktor maupun alasan yang paling mendasar untuk dijelaskan mungkin karena mereka merasa walaupun mereka warga keturunan bukan merupakan asli Indonesesia, namun setelah sekian lama mereka menetap dan akhirnya menjadi WNI mereka merasa memiliki identitas yang sama dengan warga Indonesia yang lainnya. Melihat dari kesamaan identitas mereka dengan warga lainnya,hal Itulah yang menyakinkan

mereka, bahwa mereka memiliki hak dan kewajiban sama dalam partisipasi politik, serta menimbulkan kesadaran politik ditengah-tengah masyarakat etnis Tionghoa sebagai rasa tanggung jawab mereka sebagai warga negara Indonesia dalam hal partisipasi politik dalam hal ini ikut memberikan hak suaranya dalam suatu pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Politik, serta menimbulkan kesadaran politik ditengah tengah masyarakat etnis Tionghoa sebagai rasa tanggung jawab.

**Gambar 2**

**Piramida Partisipasi Politik**



**Keterangan:**

- a) Aktivis: Pejabat partai penuh waktu, pimpinan parpol di LSM.
- b) Partisipan: Petugas kampanye dan anggota aktif dari partisipan prtai/ kel. Kepentingan, aktif dalam proyek-proyek sosial.
- c) Pengamat: Menghadiri rapat umum, anggota partai/kel. Kepentingan, usaha menyakinkan orang, memberikan suara dalam pemilu, mendiskusikan masalah politik, perhatian pada perkembangan politik.
- d) Apolitis: Orang yang Apolitis<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> David F. Roth Dan Frank L. Wilson, 1980

## 2. Bentuk-bentuk Partisipasi Politik

Partisipasi politik sebagai suatu bentuk kegiatan dibedakan atas dua bagian, yaitu<sup>28</sup>:

a) Partisipasi aktif, yaitu kegiatan yang berorientasi pada output dan input politik. Yang termasuk dalam partisipasi aktif adalah mengajukan usul mengenai suatu kebijakan yang dibuat pemerintah. Mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintah.

b) Partisipasi pasif, yaitu kegiatan yang hanya berorientasi pada *output* politik.

Pada masyarakat yang termasuk kedalam jenis partisipasi ini hanya menuruti segala kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tanpa mengajukan kritik usulan perbaikan.

Berdasarkan jumlah pelakunya bentuk partisipasi politik dikategorikan menjadi dua yakni partisipasi individual dan partisipasi kolektif. Partisipasi individual dalam bentuk kegiatan seperti menulis surat yang berisikan tuntutan atau keluhan kepada pemerintah, sedangkan kolektif adalah bentuk kegiatan warga negara secara serentak dimaksud untuk mempengaruhi penguasa seperti dalam kegiatan pemilihan umum.

Namun, berbeda dengan Huntington dan Nelson<sup>29</sup> menjelaskan bahwa partisipasi politik dapat terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan perilaku yakni:

a) Kegiatan pemilihan mencakup pemberian suara, sumbangan-sumbangan untuk kampanye.

b) Mencari dukungan, atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan. Ikut dalam pemungutan suara adalah bentuk partisipasi yang jauh lebih luas dibandingkan dengan bentuk-bentuk partisipasi lainnya.

---

<sup>28</sup> Ramlan Surbakti, h. 143.

<sup>29</sup> Huntington dan Nelson, *Partisipasi*, h. 16-19

- c) *Labbying*, mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pimpinan-pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan yang menyangkut kepentingan umum.
- d) Kegiatan organisasi, menyangkut partisipasi sebagai anggota dalam suatu organisasi yang tujuan utamanya adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.
- e) Mencari koneksi (*Contacting*) merupakan tindakan perseorangan yang ditujukan terhadap pejabat pemerintah dengan maksud memperoleh manfaat bagi satu orang atau sekelompok orang.
- f) Tindakan kekerasan (*Violence*), sebagai suatu upaya untuk mempengaruhi keputusan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang atau benda.

Oleh karena itu kekerasan bisanya mencerminkan motivasi-motivasi yang lebih kuat. Kekerasan dapat ditujukan untuk mengubah pimpinan politik, mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah atau merubah seluruh sistem politik. Almond<sup>30</sup> mengklasifikasikan kegiatan partisipasi dengan pendekatan konvensional dan non konvensional, kegiatan politik konvensional adalah bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern sedangkan non-konvensional termasuk yang beberapa mungkin legal maupun ilegal penuh kekerasan dan revolusioner. Bentuk-bentuk dan frekuensi partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik, integritas kehidupan politik kepuasan dan ketidakpuasan warga negara.

Bentuk partisipasi politik yang berupa pemberian suara (*Voting*) merupakan suatu bentuk yang paling umum digunakan dari masa lampau hingga sekarang, baik dalam masyarakat tradisional maupun modern. Disamping itu pemberian suara boleh jadi merupakan bentuk partisipasi politik aktif yang paling luas tersebar di berbagai

---

<sup>30</sup>Almond Gabriel, *Sosialisai Kebudayaan Dan Partisipasi Poitik*, dalam Mochtar Mas'ood & Mac Avidrews (Eds), *Perbandigan Sistem Politik* (Yogyakarta: UGM University Press, 1984),h. 89.



masyarakat. Bentuk partisipasi politik lewat pemberian suara dewasa ini lagi dikaitkan dengan sistem politik yang sedang berlangsung di suatu negara. Dengan kata lain, aktifitas pemberian suara tidak tergantung apakah negara yang bersangkutan menggunakan cara-cara demokrasi atau totaliter dalam pemerintahannya. Bagi negara yang bersistem demokrasi persoalan partisipasi politik dalam bentuk pemberian suara ini bukanlah persoalan yang rumit karena aktifitas pemberian suara selaras dengan sikap demokrasi tersebut.

Menurut Budiardjo<sup>31</sup> bentuk partisipasi politik yang lain adalah kegiatan kampanye. Kampanye biasanya dilakukan sebelum kegiatan pemberian suara atau pemungutan suara. Ditinjau dari segi kuantitasnya lebih banyak dibandingkan dengan diskusi politik, namun dari segi kualitas tampak adanya dua kelompok dalam kegiatan tersebut. *Pertama*, pada kelompok mayoritas yang kegiatannya terbatas, yang hanya ikut-ikutan saja tanpa didasari kejernihan berfikir serta strategi tertentu. *Kedua*, adalah kelompok minoritas yang selain aktif dalam kegiatan kampanye juga berperan sebagai penggerak.

Secara sederhana Budiardjo<sup>32</sup> membagi partisipasi dalam dua bentuk. Bentuk partisipasi aktif antara lain memberikan suara dalam pemilu, turut serta dalam demonstrasi ataupun memberikan dukungan keuangan dengan memberikan sumbangan. Bentuk partisipasi pasif adalah bentuk partisipasi yang sebentar-sebentar, misalnya dalam diskusi politik informal oleh individu-individu dalam keluarga masing-masing, ditempat kerja maupun antara sahabat-sahabat.

## **B. Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada)**

Sebagian besar negara yang berasaskan demokrasi, Pemilihan umum dianggap lambang, sekaligus tolok ukur, dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta

---

<sup>31</sup>Budiardjo, *Partisipasi Dan Partai Politik*, h. 5

<sup>32</sup>*Ibid*, h.5

aspirasi masyarakat. Sekalipun demikian, disadari bahwa pemilihan umum tidak merupakan satu-satunya tolok ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan yang lebih bersifat berkesinambungan, seperti partisipasi dalam kegiatan partai, Lobbying, dan sebagainya .

Pemilihan umum merupakan sarana bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasinya dalam menentukan wakil-wakilnya baik di lembaga legislatif maupun eksekutif, juga merupakan sarana ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan politik demokrasi Indonesia mengalami perubahan signifikan pasca runtuhnya Orde Baru. Kehidupan berdemokrasi menjadi lebih baik, rakyat dapat bebas menyalurkan pendapat dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik yang sangat dibatasi pada Orde Baru. Kelahiran pemilihan Kepala Daerah secara langsung merupakan salah satu kemajuan proses demokrasi di Indonesia. Melalui pemilihan kepala daerah secara langsung berarti mengembalikan hak-hak dasar masyarakat di daerah untuk menentukan kepala daerah maupun wakil kepala daerah yang mereka kehendaki. Pemilihan kepala daerah langsung juga merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap kedaulatan rakyat, karena melalui pemilihan kepala daerah langsung ini menandakan terbukanya ruang yang cukup bebas memilih pemimpinnya.

Menurut Deddy Supriyadi dan Dadang Solihin<sup>33</sup>, proses pemilihan kepala daerah di laksanakan melalui beberapa tahap. Dimulai dari tahap pendaftaran, klarifikasi, penetapan pasangan calon, rapat paripurna khusus, pengiriman berkas pemilihan, pengesahan dan pelantikan. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi yang luas nyata dan bertanggung jawab, kepala daerah dan wakil kepala daerah memiliki peranan yang sangat penting dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pengemabngan dan pelayanan masyarakat dan bertanggung jawab sepenuhnya tentang jalanya pemerintah daerah.

---

<sup>33</sup>Deddy Supriyadi dan Dadang Solihin, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002, h. 61.

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung diatur dalam UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 56 ayat 1 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 6/2005 tentang Cara pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemecatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Secara eksplisit ketentuan tentang pemilihan kepala daerah. Pasal 56 ayat (1) disebutkan:

“Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokrasi berdasarkan asas langsung, umum, rahasia, jujur dan adil”

Menurut Joko. J Prihatmoko,<sup>34</sup> dipilihnya sistem Pilkada Langsung mendatangkan optimisme dan pesimisme tersendiri. Pilkada langsung dinilai sebagai perwujudan pengembalian “ hak-hak dasar masyarakat di daerah dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam rangka rekrutmen pimpinan daerah sehingga mendimansir kehidupan demokrasi di tingkat lokal. Keberhasilan Pilkada Langsung melahirkan kepemimpinan daerah yang demokratis, sesuai kehendak dan tuntutan rakyat sangat bergantung pada kritisisme dan rasionalitas rakyat sendiri.

Dalam kaitanya dengan pemilihan kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut 2018, menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua diatas Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah. Bahwa dalam rangka mewujudkan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, penyelenggaraan Pemerintah daerah diarahkan agar mampu melahirkan kepemimpinan daerah yang efektif dengan memperhatikan prinsip demokrasi, persamaan, keadilan, dan kepastian hukum dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa untuk mewujudkan kepemimpinan daerah yang demokratis yang memperhatikan prinsip persamaan dan keadilan, penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang.

---

<sup>34</sup>Joko J. Prihatmoko *Pilkada secara Langsung*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002, h. 1-2

### C. Orang Tionghoa

Tionghoa atau Tionghwa (ejaan hokkien dari kata Hanzi), Bangsa Tionghoa atau orang Tionghoa adalah sebutan di Indonesia untuk orang-orang dari suku atau bangsa Tionggok. Kata ini dalam bahasa Indonesia sering dipakai untuk menggantikan kata “Cina” yang kini memiliki konotasi negatif<sup>35</sup> kata ini juga dapat merujuk kepada orang-orang Tionggok yang tinggal di luar Republik Rakyat Tionggok, seperti di Indonesia (Tionghoa Indonesia), Malaysia (Tionghoa-Malaysia), Singapura, Hong Kong, Taiwan, Amerika Serikat.

Dengan demikian, dalam bahasa Indonesia, istilah orang Tionghoa dan orang Tionggok memiliki perbedaan makna, pertama merujuk pada etnis atau suku bangsa, yang kedua, merujuk kepada kewarganegaraan Republik Rakyat Tionggok. Orang-orang Tionggok yang pergi merantau umumnya disebut sebagai orang Tionghoa Perantauan (Hoakiao).

Di Tionggok sendiri, konsep serupa dikenal dengan nama *Huaxia* (sederhana) yang merujuk pada konsep bangsa serta peradapan Tionggok, yang bersumber dari kesadaran bangsa Han (kelompok etnis mayoritas di Tionggok Daratan, yang berasal dari Dinasti Han) atas nenek moyang mereka, yang secara kolektif disebut sebagai *Huaxia*. Sedangkan istilah *Zhonghua* sendiri digunakan secara resmi dalam nama negara, baik pada waktu sebelum Perang Dunia II (Republik Tionggok – *zhonghua minguo*) maupun setelah perang Saudara Tionggok (Republik Rakyat Tionggok – *Zhonghua renmin gongheguo*).

Meski secara kuantitatif golongan etnis Tionghoa merupakan minoritas dibandingkan dengan kelompok-kelompok etnis lain di Indonesia, namun secara kualitatif dampak yang mereka timbulkan begitu serius. Tahun 1961 jumlah mereka diperkirakan sebanyak 2,45 juta jiwa atau sekitar 2,5% dari total penduduk Indonesia waktu itu<sup>36</sup>. I. Wibowo mengajukan jumlah lain, yakni sekitar 3% dari penduduk

---

<sup>35</sup> Ibid, h. 199

<sup>36</sup> Coppel, C.A., *Indonesia chinese in crisis*, oxford: oxford university press, 1983, h. 1

Indonesia<sup>37</sup>, Sementara Tarmizi Taher, mantan menteri Agama era Orde Baru yang cukup prihatin dengan isu-isu Tionghoa, mengajukan taksiran yang lebih tinggi, yaitu antara 4-5% dari keseluruhan penduduk Indonesia.

Jumlah etnis Tionghoa di Indonesia memang relatif kecil, namun peran mereka bisa dibilang cukup besar, terutama di sektor ekonomi. I. Wibowo<sup>38</sup> menduga bahwa sebagian etnis Tionghoa di Indonesia telah menguasai sektor 70-80% perekonomian negara ini, meski pendapat tersebut diragukan, bahkan menuai banyak kecaman dari berbagai kalangan karena atidak di dasarkan dari bukti empirik yang kuat. Begitu pentingnya keberadaan mereka sampai-sampai lahir sebuah istilah “masalah Cina” untuk menggambarkan betapa seriusnya persoalan-persoalan akibat kehadiran mereka. Jika dicermati lebih jauh, sebenarnya kata “Cina” dalam istilah tersebut bukanlah sesuatu yang netral dengan sendirinya. Ia sengaja di ciptakan oleh negara untuk melanggengkan ingatan publik tentang dosa-dosa orang Cina di masa lalu, terutama terkait dugaan keterlibatan mereka dalam Gerakan 30 September 1965 (G30S).

Salah satu isi penting yang terkait dengan “masalah Cina” adalah persoalan Diskriminasi. Diskriminasi terhadap etnis Tionghoa di Indonesia masih dalam persolan serius hingga hari ini. Pelecehan dan kekerasan terhadap mereka sudah menjadi sesuatu yang terlanjur dianggap wajar. Mereka pun seolah-olah tidak memiliki cara lain untuk menghadapi situasi tersebut, selain menerimanya dengan pasrah dan menganggapnya sebagai takdir sosial yang harus ditanggung oleh golongan minoritas asing<sup>39</sup>. Paling-paling mereka hanya bisa menggerutu di belakang ketika diperlakukan tidak adil, misalnya dijarah harta bendanya, dan mereka tetap tak punya cukup kuasa untuk mengubahnya. Meski kehadiran mereka di Nusantara sudah

---

<sup>37</sup> Wibowo, I, *Retrospeksi Dan Rekontekstualisasi Masalah Cina*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001, h. 95

<sup>38</sup> *Ibid*, h. 95

<sup>39</sup> Lan, T.J, “PengalamanEtnik Cina Dalam Pembentukan Identitas (Nasional) Indonesia,” Makalah, Disampaikan Dalam Simposium Etnis Cina Sebagai Minoritas Di Indonesia Pada 26 Oktober 1998, Depok, h. 4

berabad-abad lamanya, tidak sedikit masyarakat pribumi yang masih memandang mereka sebagai orang asing yang belum mampu melakukan pembauran dalam kehidupan masyarakat pribumi.

Masalah diskriminasi rasial kembali mengemukakan ketika tragedi Mei 1998 meletus, menandai lahirnya Era reformasi. Kerusuhan yang terjadi pada tanggal 13-15 Mei 1998 ini berlangsung secara sporadis, melanda hampir semua kota besar di Indonesia, terutama Jakarta, Yogyakarta, dan Solo. Kerusuhan yang menandai pergantian era kekuasaan di Indonesia ini menelan kerugian yang tidak sedikit, khususnya bagi orang-orang Tionghoa. Apakah kerusuhan tersebut secara langsung ditujukan kepada mereka, masih menjadi pertanyaan yang sama jawabannya tetapi bahwa merekalah pihak yang paling menderita dan menjadi korban kerusuhan tersebut adalah sesuatu yang tidak dapat dipungkiri. Banyak ditemukan fakta bahwa penyerangan dan pembakaran dalam kerusuhan-kerusuhan tersebut dimulai dengan perusakan dan penjarahan terhadap toko-toko dan rumah-rumah milik orang-orang keturunan Tionghoa.

#### **D. Sejarah Etnis Tionghoa Dalam Politik**

##### **1. Sejarah Tionghoa Dalam Politik**

Etnis Cina dan Indonesia memiliki kaitan historis yang terbangun dalam rentang waktu cukup panjang. Kaitan itu berlangsung sejak berabad-abad yang lalu. Meskipun beragam pendapat mengenai kapan persisnya orang Cina mulai datang ke Nusantara dan kapan pula persisnya mulai membangun perkampungan, satu hal yang jelas adalah bahwa hubungan historis dan sosiologis antara Cina dan Indonesia telah menjadi bagian dari perjalanan sejarah Indonesia, terutama sejarah modern.

Berabad-abad lamanya, demikian Peck Yang menulis, orang Cina dari beragam provinsi sebelah Tenggara Cina telah mulai pindah dan menetap di kepulauan Indonesia. Dari seluruh kelompok dialek di provinsi ini, marga Hokkien adalah pelopornya. Namun, kepindahan awal tidak sebanding dengan dua arus besar

kepindahan dari seluruh kelompok dialek yang terjadi selama periode 1860-1890 dan 1900-1930. Dengan dimulainya era abad XX, sejarah panjang perpindahan telah membentuk suatu komunitas Cina yang besar dan kuat di kawasan Hindia Belanda.<sup>40</sup>

Ada yang mengatakan bahwa orang-orang dari daratan Cina sudah menginjakkan kakinya di Nusantara sejak tahun 671 Masehi. Mereka melawat atau sekadar lewat dan tinggal selama beberapa bulan untuk kemudian meneruskan perjalanan ke tempat lain. Ada yang menyebutkan lagi bahwa orang-orang Cina yang datang ke Nusantara sampai dengan abad ke-8 berupa kunjungan beberapa pendeta dan Budha. Pada masa pemerintahan Dinasti Song (992 M), terjadi hubungan dagang antara Cina dan kepulauan Nusantara. Namun, ada yang menyebutkan bahwa hubungan dagang dengan kepulauan Nusantara (khususnya Jawa, Sumatera, dan Bangka) sudah berlangsung sejak abad ke-3 M.

Hubungannya dengan kalimantan berlangsung sejak abad ke-9 M. Pernah diberitakan ada junk orang Cina meninggalkan Pantai Semarang pada 924 M.<sup>41</sup>

Namun, sejak kapan orang-orang Cina mulai bermukim dan membangun perkampungan di Indonesia? Pemukiman kecil orang Cina atau Tionghoa sudah ada di Indonesia jauh sebelum kedatangan orang Eropa, terutama di bandar perdagangan di sepanjang pantai utara Pulau Jawa. Ketika Belanda memantapkan kedudukannya di Jawa, penduduk Cina lalu bertambah banyak dan tersebar luas. Bahkan, di kawasan yang ada pada abad ke-18 belum lagi berada di bawah kekuasaan Belanda, seperti dengan Kalimantan Barat dan Bangka, orang Cina telah datang dalam jumlah besar. Menjelang tahun 1860, di perkirakan jumlah penduduk Cina di Indonesia sebanyak 222.000 orang dua pertiganya berdiam di Pulau Jawa.

Ada yang mengatakan bahwa perkampungan orang Cina mulai hadir di Jawa sejak Belanda kembali ke Banten, setelah Pulau Jawa sempat dikuasai sementara oleh Inggris pada 1811-1818. Pendapat lain menyebutkan bahwa pada masa kunjungan

---

<sup>40</sup>. Twang Peck Yang, *Elite Bisnis Cina di Indonesia dan Masa Transisi Kemerdekaan 1940-1950*. Yogyakarta: Niagara, 2004, h. 27.

<sup>41</sup>. Hari Poerwanto, *Orang Cina Khek dari Singkawang*. Jakarta: Komunitas Bambu, 2005, h. 40.

armada dagang orang Cina ke Nusantara tahun 1405-1430, di Tuban, Gresik, dan Surabaya telah ditemukan permukiman orang Cina. Rumah mereka dibuat dari batu dan halamannya berpagar.<sup>42</sup>

Menurut studi Coppel, sejak awal 1930, tatkala gelombang imigrasi mulai menurun, hampir dua pertiga orang Cina di Indonesia dilahirkan di Indonesia. Menjelang akhir tahun 1950-an barangkali perimbangannya sudah meningkat sampai 80 persen. Orang Cina bukanlah pendatang baru atau minoritas imigran sementara, melainkan suatu kelompok penduduk yang menetap.<sup>43</sup>

Kedatangan dan kehadiran orang Cina itu, terutama di Jawa, Sumatera, dan sebagian Kalimantan, lebih bertujuan untuk kepentingan bisnis atau hubungan perdagangan. Oleh karena itu, tradisi bisnis di Indonesia hingga saat ini lebih banyak diwarnai dan didominasi oleh kalangan kelompok ECI. Namun, ketika orang dari warga kelompok ECI mulai banyak yang bermukim di Indonesia dan tinggal di pinggiran kota, tidak sedikit pula di antara mereka yang kemudian menjadi petani.

Ketika kerajaan banten jatuh, misalnya, pusat perdagangan pindah ke Batavia dan jumlah orang Cina yang sekitar 400 orang pada 1.602 kemudian meningkat menjadi sekitar 14.000 pada 1828. Sebagian dari mereka itulah yang mempertahankan hidupnya dengan menjadi petani, baik petani sawah maupun petani yang menanam tebu dan sayur-sayur.<sup>44</sup> Bahkan, saat ini seperti terlihat jelas di Kalimantan Barat, misalnya, sebagian besar dari kalangan warga kelompok ECI setempat bermata pencaharian sebagai petani. Hanya saja kehidupan dan potret masyarakat kelompok ECI di Indonesia tidak begitu terkenal sebagai petani, tetapi lebih populer sebagai orang yang pandai berdagang atau mengurus ekonomi.

Pemahaman tentang kelompok ECI yang lebih identik dengan perdagangan dan ekonomi itu turut diperkuat oleh penjelasan sejumlah penulis asing tentang orang keturunan Cina di Indonesia. Misalnya, Victor Purcell menyebutkan bahwa

---

<sup>42</sup>. Charles A. Coppel, *Tionghoa Indonesia Dalam Krisis*. Jakarta: Sinar Harapan, h. 21.

<sup>44</sup>. Ibid, hal. 44.



dari keseluruhan pekerja Cina di Indonesia kelompok terbesar bermata pencaharian pedagang. Dillmott menyebutkan bahwa kelompok bisnis Indonesia sangat kecil, tetapi tumbuh dengan cepat dan golongan keturunan Cina adalah sebagian besar dari pedagang itu.<sup>45</sup>

## 2. Faktor Pendorong Keterlibatan Dalam Politik

Berdasarkan pandangan dan argumentasi dari para informan dan hasil penelitian para peneliti terdahulu, tentang keterlibatan kelompok ECI (Tionghoa) dalam politik memiliki faktor pendorong, terdiri atas tiga faktor, yaitu idealisme, pragmatisme, dan kekuasaan. Ketiga faktor pendorong dapat diuraikan sebagai berikut:

### a. Faktor Idealisme

Salah satu faktor pendorong warga kelompok ECI mau terlibat dalam politik, adalah faktor Idealisme. Idealisme masyarakat ECI dalam politik tampak lebih didorong oleh pengakuan pemerintah dan masyarakat pribumi tentang eksistensi etnis Tionghoa, yaitu bahwa kalau kelompok ECI sebenarnya sudah dapat terlibat dalam politik dan mereka merupakan sosok warga negara Indonesia yang eksis yang sama dengan bangsa Indonesia yang lain dari pihak pribumi. Jadi, warga kelompok ECI lebih pada pengakuan eksistensi mereka, bukan pada masalah ideologi komunis atau idealisme yang mempunyai manifestasi dengan ideologi negara Cina sebagai ideologi negara leluhurnya.

Hal itu lebih dijelaskan oleh informan bahwa pada saat sekarang ini ada pengakuan bahwa kami (kelompok etnis Tionghoa) dapat juga menjadi anggota DPR. Kami sekarang ini ada keinginan untuk menang dalam pemilu karena mereka berkeinginan menunjukkan bahwa warga etnis Tionghoa juga dapat menjadi wali kota seperti yang pernah dilakukan oleh etnis lain terdahulu. Jadi, hal itu sebenarnya yang melandasi semangat eksistensi pengakuan terhadap mereka, bukan karena adanya tumpangan kepentingan politik lain.

---

<sup>45</sup>. Lihat, A.B. Tangdililing, "Partisipasi Politik Keturunan Cina di Kalimantan Barat: Kasus Singkawang, kabupaten Sambas", dalam Jurnal Ilmu Politik, no. 6. Tahun 1990, h. 42.

Dalam diri mereka tumbuh kesadaran persaingan secara tulus dan sehat bahwa realitas masyarakat ECI bersifat pluralistik, yakni ada berbagai suku bangsa, salah satu dari etnis adalah sudah pernah menjadi wali kota. Dewasa ini Indonesia sedang memasuki era globalisasi, yaitu era yang semua negara di dunia tidak dapat mengelakkan. Artinya, keadaan itu tidak terkecuali untuk Indonesia. Salah satu muatan globalisasi adalah demokratisasi. Dari aspek itu, Indonesia telah berhasil melewatinya dengan predikat sangat memuaskan. Apa itu globalisasi? Globalisasi artinya masyarakat dunia yang berhimpun menghadapi suatu keadaan yang disebut dengan masyarakat tanpa batas (*borderless society*). Globalisasi menjadikan komunikasi mudah terjangkau oleh semua manusia di muka bumi.

Globalisasi juga menjadikan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi komunikasi, dapat saling menjangkau tempat dengan jarak yang berjauhan dalam waktu yang sama. Hal itu berdampak kepada negara kita sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pergaulan bangsa di dunia sejak Indonesia memasuki fase reformasi dan akibat tuntutan reformasi yang berciri demokratisasi sehingga melahirkan kebebasan. Itulah yang menjadi acuan itu harus dirujuk terlebih dahulu dengan teori ketahanan nasional. Dalam perspektif ketahanan nasional, *the borderless society* hanya digunakan untuk menyebut sifat jangkauan teknologi komunikasi yang praktis antara warga dunia yang satu dan warga dunia yang lain yang saling berjauhan di antara dua benua yang berbeda.

Jadi, sifat *the borderless society* sama sekali bukan untuk menisbatkan batas kedaulatan kedua negara, Indonesia dan Amerika Serikat. Oleh sebab itu, sebagai *the borderless society* tidak boleh disalahkaprahkan makna implementasinya sebagai negara tanpa batas kedaulatan wilayah geografi dan bagi warga negara di suatu negara yang berlatar belakang warga negara asing, kemudian melakukan naturalisasi pada suatu negara yang menjadi pilihannya menjadi warga negara setempat. Dengan merujuk idealisme warga kelompok ECI, hal itu sangat memungkinkan bahwa dalam hasil Pemilu legislatif pada tahun 2009, warga kelompok ECI yang terpilih menjadi anggota legislatif.

Faktor dorongan idealisme warga kelompok ECI untuk terlibat kedalam politik tidak terlepas dari faktor pandangan bangsa Cina yang kerap bersifat dualisme, yaitu di satu sisi cara hidup yang maju dan modern seperti yang dicapai oleh bangsa Barat, yakni kemajuan teknologi tinggi mau ditiru dan diikuti, sedangkan di satu sisi tetap mempertahankan cara hidup tradisionalisme Cina yang berdasarkan konfusianisme yang dianggap melahirkan kearifan sebagai orang Timur yang lebih baik dari bangsa manapun di dunia. Sehubungan dengan itu, Creel menulis sebagai berikut:

“selama satu abad terdapat dua cara hidup dan cara berpikir yang berebutan pengaruh untuk mendapat pengikut di kalangan bangsa Cina. Yang satu adalah cara hidup dan cara berfikir cara leluhur mereka. Seratus tahun yang lampau sebagian besar bangsa Cina lebih menyukai cara hidup dan cara berfikir yang disebut terakhir. Selama waktu yang lama bangsa Cina percaya bahwa mereka yang lebih pandai, lebih berbudaya, dan lebih cakap di banding bangsa-bangsa manapun. Namun, serangkaian guncangan yang dahsyat berangsur-angsur merusak kepastian mereka ini. Ternyata mereka tidak mampu melindungi diri sendiri dalam arti militer sehingga terjadi penerobosan-penerobosan terhadap perbatasan negeri mereka ini. Sebagai akibatnya, mereka mengizinkan orang-orang Eropa dan Amerika yang tidak mereka sukai berdiam di Cina. Hal ini masih mengakibatkan lagi penerobosan yang menggelisahkan terhadap kejiwaan mereka.”<sup>46</sup>

Status kewarganegaraan bangsa Indonesia dalam NKRI mendapatkan legitimasi alamiah dan administrasi. Sedangkan status kewarganegaraan kelompok ECI dalam NKRI mendapatkan legitimasi dari administratif saja. Dari faham itu jelas bahwa status kewarganegaraan dalam NKRI terdapat hubungan struktural antara bangsa Indonesia dengan warga Negara Indonesia. Bangsa Indonesia sebagai pendiri dan pewaris NKRI dalam konteks alamiah, *de facto dan de jure*. Sedangkan warga negara Indonesia dalam hal ini kelompok ECI tidak memiliki hak waris atas NKRI. Oleh karena itu timbul pegangan analogik bahwa “seluruh bangsa Indonesia adalah warga

---

<sup>46</sup>H.G. Creel, *Alam Pikiran Cina Sejak Konfusius Sampai Mao Zedong*, Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta: 1989, h.1

negara Indonesia, akan tetapi tidak seluruh warga negara Indonesia adalah bangsa Indonesia”.

b. Faktor Pragmatisme

Keterlibatan kelompok ECI dalam politik, antara lain karena adanya faktor pendorong kepentingan pragmatisme yang antara lain, bertujuan menyelamatkan dan mengamankan aset yang telah diperoleh selama era Orde Baru. Pada tahun 1998 aset yang dimiliki oleh kelompok ECI, menjadi sasaran penjarahan massa. Peristiwa itu terjadi pada kalangan warga kelompok ECI yang beranggapan bahwa karena kelompok ECI tidak memiliki politisi yang dapat memperjuangkan aspirasi mereka.

Pragmatisme merupakan sikap untuk menanggapi suatu fenomena yang sedang terjadi dengan cepat, apa lagi jika fenomena itu berkaitan dengan ketidaknyamanan jasmani dan rohani yang sangat diperlukan untuk dilakukan reaksi yang cepat dan tepat. Dalam kaitan itu, ketika pergantian rezim otoriter Orde Baru jatuh pada tanggal 21 Mei 1998, kemudian digantikan oleh era Reformasi yang demokratis yang menjadi fenomena politik yang baru bagi kelompok ECI, patut mereka menggunakan sikap pragmatis, apa lagi selama era Orde Baru mereka diperlakukan diskriminatif oleh Orde Baru, kemudian era Reformasi memberikan suasana politik yang demokratis. Hal itu akan mengubah nasib kelompoknya dari status diskriminatif menjadi status setara dengan warga negara Indonesia lain dalam bentuk keterlibatannya dalam politik.

Dalam kaitan seperti itu, tampaknya sikap pragmatis kelompok ECI relevan dengan situasi politik yang sedang berkembang. Larangan pragmatisme terhadap warga negara Indonesia karena menggunakan acuan Pancasila sebagai ideologi negara merupakan reaksi pragmatisme terhadap ideologi negara secara negatif. Misalnya, pada era Reformasi yang “demokratis liberal” serta merta mau menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi liberal atau menggantinya dengan ideologi komunisme, ideologi politik RRC sebagai negara leluhur kelompok ECI.

Selain itu, selama hal itu merupakan aspirasi, khususnya dari etnis Tionghoa, tidak tersalurkan ke lembaga legislatif atau kepada pemerintah secara formal.

Kejadian itu disebabkan oleh permasalahan bahasa sehingga mereka menjadi kesulitan untuk menyampaikan aspirasinya kepada lembaga legislatif. Kemudian berkecimpung langsung di perpolitikan, mereka dapat menyampaikannya dengan kakak-kakaknya ibunya, atau kepada anggota DPRD secara langsung dengan menggunakan bahasa etnis Tionghoa, kemudian langsung diperjuangkan di legislatif. Jadi, sebenarnya yang menjadi kendalanya selama ini adalah masalah kultur. Kalangan etnis Tionghoa masih sangat banyak yang belum berpendidikan akibat diskriminasi selama 32 tahun terakhir ini. Jadi, kita harus memaklumi jika banyak lebih tinggi di masyarakat yang berkaitan dengan perpolitikan.

Untuk itu, kita bersyukur atas Reformasi dan dengan adanya reformasi kita dapat duduk di legislatif. Hal itu berarti kita dapat berkomunikasi dengan masyarakat etnis Tionghoa dengan lebih lancar. Mereka juga tidak merasa segan menyampaikan aspirasinya kepada kita.

#### c. Faktor Kekuasaan

Kekuasaan (*power*) merupakan salah satu subjek penting yang menjadi pusat perhatian dalam ilmu politik (Andrey Heywood). Secara umum, kekuasaan sebagai kemampuan pelaku untuk memenuhi tingkah laku memengaruhi perihal lain sesuai dengan keinginannya. Charles Andrain mengartikan kekuasaan sebagai penggunaan sejumlah sumber daya untuk memperoleh kepatuhan dari pihak lain. Sumber kekuasaan dari Miriam Budiardjo, di antaranya kedudukan, kekayaan, kepercayaan atau agama, kepandaian dan keterampilan, serta adikodrati yang menjadi sumber kekuasaan Jawa yang ditulis oleh Isbodroini.

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang bercirikan pluralisme, khususnya dalam perspektif etnisitas, tiap-tiap kelompok etnis di Indonesia mungkin berbeda-beda sumber kekuasaannya. Sehubungan dengan sumber kekuasaan dari mana diperoleh, Miriam Budiardjo mengemukakan lima sumber kekuasaan, yakni kedudukan, kekayaan, kepercayaan, atau agama, hubungan kerabat atau kekerabatan, serta kepandaian dan keterampilan. Sumber kekuasaan yang di kemukakan oleh Miriam Budiardjo itu kategori sumber kekuasaan modern sebagaimana sumber kekuasaan

yang ada pada negara dalam kaitannya dengan kekuasaan negara yang senantiasa diperebutkan oleh para politisi melalui perjuangan partai politik.

Saya pikir cara menggunakan kekuasaan yang baik itu harus mampu menunjukkan manfaatnya kepada semua golongan dalam masyarakat, bukan kepada etnisitas asal penguasa itu datang, melainkan kepada semua apa pun etnisnya dan apa pun golongan sosialnya. Pendek kata, kepada masyarakat secara umum. Penguasa yang baik tidak bisa menggolongkan hanya satu golongan tertentu saja untuk diperhatikan selama masa kekuasaannya. Memang ini pasti tidak mudah dilakukan oleh penguasa tetapi yang pasti itu akan menjadi perjuangan utama agar sedapat mungkin bisa terwujud, terutama kelompok yang dalam kondisi nyata bahwa dalam masyarakat dan sosial ekonominya yang terpinggirkan. Bagi saya, golongan dan kondisi sosial itu pasti akan menjadi sasaran utama untuk ditingkatkan keberadaan status sosialnya apa pun etnisnya dan apa pun golongannya serta serendah apa pun derajatnya.

### BAB III

#### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

##### A. Demografi Wilayah

Desa Sampali merupakan bagian dari Kecamatan Percut Sei Tuan dengan luas wilayah 23, 93 Km<sup>2</sup> atau 14,01% dari luas wilayah Kecamatan 190,79 Km<sup>2</sup>.<sup>47</sup> Daerah ini memiliki kontur tanah yang cenderung rata atau berupa tanah hamparan, tidak diketahui tinggi wilayah ini berdasarkan perhitungan ketinggian di atas laut. Wilayah ini sebagian merupakan daerah perkebunan (PTPN II) dan lahan perladangan, namun seiring dengan perkembangan jaman dan jumlah penduduk yang meningkat wilayah ini telah berubah menjadi pemukiman penduduk seperti kompleks pemukiman Cemara Asri.

Berdasarkan keadaan iklim hampir sama dengan wilayah-wilayah lain di Kabupaten Deli Serdang dengan tingkat intensitas curah hujan 196, 22 mm per tahun. Curah hujan paling tinggi terjadi pada terjadipadabulan Oktober seperti tabel di bawah ini:

**Tabel 3**  
**Rata-rata Jumlah Hari Hujan dan Curah Hujan Menurut Bulan di Kecamatan Percut Sei Tuan, 2016**

Bulan	Hari Hujan (hari)	Curah Hujan (mm)
(1)	(2)	(3)
Januari	12	70
Februari	17	289
Maret	6	11

---

<sup>47</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Percut Sei Tuan Dalam Angka 2017, h. 4

April	8	30
Mei	19	219
Juni	14	207
Juli	16	106
Agustus	21	234
September	25	616
Oktober	26	323
November	21	138
Desember	19	112

---

Sumber: Badan Meteorologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Sampali

## **B. Jumlah Penduduk dan Tingkat Ekonomi Penduduk**

Rakyat adalah kumpulan manusia yang hidup bersama dalam suatu masyarakat, meskipun mereka berasal dari keturunan dan memiliki kepercayaan yang berbeda. Sedangkan penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah atau Negara/ Daerah, yang biasanya sudah lama tinggal di tempat tersebut.

Adapun jumlah penduduk Desa Sampali berdasarkan sensus tahun 2016 berjumlah 32.027 jiwa dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 4**

### **Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin**

Jumlah laki-laki	15.695 orang
Jumlah Perempuan	16.379 orang
Jumlah Total	32.074 orang
Rasio Jenis Kelamin	96
Jumlah Kepala Keluarga	7.785 KK
Kepadatan Penduduk	1.340 per km

Sumber: BPS Kabupaten Deli Serdang 201



Data di  
atasmenjelaskanbahwajumlahlelakidanperempuantidakjauhberbedahanyaselisih684  
orang.KemudiankeadaanpendudukDesaSampalidapat pula  
dikemukakanberdasarkanpekerjaannya,

**Tabel5.**  
**JumlahPenduduk 15 tahunke-atasMenurutPekerjaanDesaSampali**

PNS/TNI/Polri	306 orang
Petani	221 orang
Pedagang	1.454 orang
Jasaangkutan	78orang
Industriumahtangga	143 orang
JasaKemasyarakatan	2.254 orang

Sumber: BPS Kabupaten Deli Serdang 2016

**Tabel6**  
**JumlahPendudukMenurutKelompokUmurdanJenisKlaminKecamatanPecutSei**  
**Tuan 2016**

Kelompok Umur	JenisKlamin		Jumlah
	Laki- laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	2390	2297	46882
	4	8	
5-9	2314	2215	45300
	2	8	
10-14	2102	2062	41582
	6	2	

15-19	2096	2061	41582
	0	1	
20-24	2143	2153	42965
	5	0	
25-29	1920	1946	38611
	0	1	
30-34	1794	1817	36118
	4	4	
35-39	1622	1660	32863
	5	8	
40-44	1518	1503	16548
	3	01	4
45-49	1301	1265	25660
	0	0	
50-54	1074	1106	21814
	9	5	
55-59	9018	8757	17775
60-64	5783	5160	10943
65+	6331	7153	13471
	8		
<b>Jumlah</b>	<b>2239</b>	<b>2212</b>	<b>44522</b>
	<b>27</b>	<b>996</b>	<b>3</b>

Sumber:ProyeksiPenduduk Indonesia 2010-2035 (BPS. Kab. Deli Serdang,Percut Sei Tuan  
DalamAngka 2017

### C. Pemerintahan

Pemerintahansebagai sekumpulan orang-orang yang mengelolakewenangan-kewenangan, melaksanakankepemimpinandankoordinasipemerintahansertapembangunanmasyarakatdarilembaga-

lembaga dimana mereka ditempatkan. Desa Sampal memiliki 25 Dusun, 53 RW, 106 RT dan 8 orang personil perangkat desa.

#### **D. Pendidikan**

Kemajuan suatu bangsa tentu didukung kualitas pendidikan yang baik. Hal ini tentu berkaitan dengan sarana dan prasarana pendidikan yang mendukung. Menurut kamus Bahasa Indonesia kata pendidikan berasal dari kata 'didik' dan mendapat imbuhan 'pe' dan akhiran 'an', maka kata ini mempunyai arti proses atau cara atau perbuatan mendidik. Secara bahasa definisi pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Adapun sarana pendidikan yang ada di desa Sampal 6 unit terdiri dari SD, SMP dan SMA, sedangkan di kompleks perumahan Cemara Asri sendiri terdapat yayasan pendidikan Candra Kusuma. Menurut karasio jumlah murid dan siswanya yaitu: 12 (jumlah siswa 1567 siswa dan jumlah guru 132 orang).<sup>48</sup>

#### **E. Agama dan Lembaga Keagamaan**

Tiap-tiap manusia yang lahir ke muka bumi, membawa suatu tabiat dalam jiwanya, yaitu, tabiat ingin beragama, ingin mengabdikan menyembah kepada sesuatu yang dianggapnya mahakuasa. Pembawaan ingin beragama ini memang telah menjadi fitrah manusia yang diciptakan oleh yang mahakuasa dalam diri manusia. Selain insting dan pembawaan jiwa adalah hal-hal yang mendorong manusia untuk beragama yaitu suasana kehidupan di muka bumi ini. Terdapat lima lembaga agama yang ada di dalam kompleks Cemara Asri.

---

<sup>48</sup> Kecamatan Percut Sei Tuan Dalam Angka 2017, h. 40

**Tabel 7**

**Lembaga Keagamaan di Komplek Cemara Asri**

Nama Lembaga	Alamat
Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia (MAPANBUMI) Sumut	Jl. Boulevard Utara No. 99 S, Komp. Cemara Asri, Kab. Deli Serdang
STAB Dharma Duta Mahayana V. Kuan Im	Jl. Cemara Boulevard Barat Blok I No. 338 Komp. Cemara Asri, Kab. Deli Serdang
Perkumpulan Majelis Agama Buddha Mahayana Tanah Suci Indonesia Dati. I Sumatera Utara	Jl. Cemara Boulevard Barat Blok I No. 338 Komp. Cemara Asri, Kab. Deli Serdang
Majelis Agama Buddha Mahayana Indonesia (MAJABUMI) Sumatera Utara	Jl. Cemara Boulevard Barat Blok I No. 338 Komp. Cemara Asri, Kab. Deli Serdang
Perserikatan Vipassi Indonesia Medan	Jl. Boulevard Utara No. 1 Komp. Cemara Asri, Kab. Deli Serdang

**F. Seputar Komplek Cemara Asri**

Kompleks perumahan Cemara Asri merupakan unit usaha milik pengusaha asal Sumatera Utara, H. Anif Shah pemilik Grup Anugerah Langkat Makmur (ALAM). Perumahan mewah Cemara Asri mulai dibangun pada tahun 1995, hingga kini masih terus berkembang, dari 300 hektar lahan yang dimiliki, baru 130 hektar saja yang dibangun. Sebagiannya dimanfaatkan untuk lahan terbuka masyarakat. Letak kompleks perumahan merupakan dusun satu dari Desa Sampali. Perumahan Mewah Cemara Asri yang berada di Jalan Sampali Medan sebenarnya bukan tempat masyarakat atau wisatawan tetapi tempat hunian warga yang di

dalamnya terdapat rumah ibadah umat Islam dan Buddha dan sejumlah fasilitas publik termasuk kolam renang dan sarana olahraga serta sekolah dan sebuah depot pelestarian lingkungan oleh Tzu Chi yang sudah tersebar di 50 negara.

Di perumahan ini pula terdapat vihara yang merupakan vihara terbesar di Asia Tenggara. Vihara kebanggaan warga Cemara Asri pada khususnya, dan warga Medan pada umumnya ini diberi nama Maha Vihara Maitreya. Kemegahan vihara ini menjadi magnet yang mendatangkan wisatawan tidak hanya lokal, tetapi juga internasional, seperti para wisatawan dari Eropa dan China. Keberadaan vihara terbesar di Asia Tenggara ini memberikan dampak positif bagi keberadaan dua vihara lainnya dan juga sebuah masjid megah yang bernama Masjid Al-Musannif.

Lokasi Maha Vihara Buddha Maitreya berdekatan dengan Masjid Al-Musannif. Masih berada dalam satu kawasan kompleks Perumahan Mewah Cemara Asri Medan. Vihara Maitreya letaknya di dalam perumahan, sementara Masjid Al-Musannif letaknya di luar perumahan sebelum pintu gerbang menuju Perumahan Cemara Asri. Disamping Maha Vihara Maitreya yang megah, terdapat sebuah rawa kecil yang tadinya hanyalah kavling yang akan dibangun menjadi perumahan. Namun, atas inisiatif pengelola Kompleks Cemara Asri, H. Anif, lahan tersebut akhirnya dijadikan sebagai tempat habitat burung. Berdasarkan penelitian, jumlah burung di tempat ini terus bertambah setiap harinya mencapai hingga 5.000 ekor.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Bentuk Partisipasi Politik Etnis Tionghoa Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Komplek Cemara Asri Tahun 2018**

Keikutsertaan warga negara atau masyarakat dalam suatu kegiatan politik, tidak terlepas dengan adanya partisipasi politik dari masyarakat. Dimana masyarakat merupakan faktor terpenting dalam menentukan pemimpin pemerintahan baik di tingkat pusat sampai pada tingkat daerah yakni Desa. Jika dilihat tingkat pemahaman politik di Cemara Asri Tahun 2018, masyarakat cenderung meningkat, hal ini dibuktikan dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) yang ada di kompleks cemara ASRI berjumlah 975 orang dengan suara yang masuk berjumlah 876. Tidak terkecuali masyarakat Tionghoa juga ikut memberikan hak suaranya. Tidak semua masyarakat Tionghoa paham dengan politik yang terjadi saat ini, seperti yang dijelaskan oleh bapak Feri selaku masyarakat Tionghoa di Komplek Cemara Asri: “keikutsertaan warga negara Indonesia dalam pilkada sangat menentukan keberhasilan diri sendiri dalam sistem demokrasi, oleh sebab itu kehadiran warga sangat penting untuk memberikan suara pilihannya ke TPS”.

#### **B. Kencenderungan Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018.**

Pilkada atau pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2018-2023, mencatat fenomena baru di Desa Sampali persisnya di Komplek Cemara Asri. Antusias warga Tionghoa tahun 2018 meningkat tajam untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dibandingkan pemilihan Gubernur sebelumnya tidak terlalu ramai atau partisipasi tahun ini meningkat drastis dari tahun sebelumnya. Bangkitnya partisipasi dan soliditas pemilih dari

etnis Tionghoa di Cemara Asri, selama ini orang Tionghoa dianggap sangat apolitis dan cenderung mengabaikan setiap pemilu, bahkan menghindari setiap aktivitas politik. Mereka lebih sibuk dan memfokuskan diri pada sektor ekonomi dan perdagangan. Hasilnya kini sangat terasa. Mereka menguasai sektor perekonomian, bahkan disebut-sebut segelintir taipan<sup>49</sup> menguasai lebih dari 82 persen perekonomian Indonesia. Buah ketekunan ini sungguh dahsyat.

Di masa lalu, bukan fenomena yang mengagetkan bila dalam pilkada atau pilpres, etnis Cina (Tionghoa) memilih berlibur keluar kota atau keluar negeri dari pada partisipasi memilih calon yang di tentukan. Tak meherankan bila tingkat partisipasi mereka sangat rendah. Saat menjelang Pilkada dan Pilpres memang boleh disebut masa “Susah” bagi suku Tionghoa yang dikenal sebagai pedagang atau pembisnis yang ulet dan saudagar kaya. Banyak yang jauh hari sudah “menghilang” ke luar kota atau negeri dari pada ikut berpartisipasi dalam pemilihan baik Pilpres maupun Pilkada.

Sudah bukan lagi menjadi rahasia mereka selalu menjadi sapi perah kalangan parpol atau kandidat, terutama *Incumbent*.<sup>50</sup> Dalam pilkada pada tahun ini antusias masyarakat etnis Tionghoa memiliki fenomena yang berbeda dari sebelumnya, Dari data KPU sejumlah TPS menunjukkan peningkatan partisipasi Komplek Cemara Asri sungguh menakjubkan, Bahkan kekurangan Kartu Pemilih Tetap (KPT). Bagi masyarakat pemegang KTP Di Komplek Cemara Asri yang tidak memiliki Undangan (C6) boleh memakai KTP dari jam 12.00 S/D 13.00 WIB. Komplek Cemara Asri memiliki 4 TPS, masing-masing TPS sudah tertera atau terdaftar setiap nama penduduk Tionghoa. Salah satu syarat untuk memilih pada Pilkada tahun 2018 ini adalah sebagai berikut:

- a. Membawa C6 (kertas pemilih wilayah Medan)
- b. Membawa surat keterangan dari KPPS. Desa

---

<sup>49</sup>

<sup>50</sup> Petahana(bahasa inggris: Incumbent), berasal dari kata “tahana”, yang berarti kedudukan, kesabaran, atau kemuliaan dalam politik. Kata ini pertama kali diperkenalkan oleh salomo simanungkalit pada tanggal 6 Februari 2009. kbvi. wikipedia.

- c. Membawa KTP Elektrik (12.00 WIB)
- d. Membawa Kartu Keluarga (KK) asli (12.00 WIB)
- e. Membawa paspport (12.00)
- f. Membawa Sim surat izin menfemudi (12.00)

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun ini sangat padat, bisa dilihat dari gambar penulis ambil di TPS Komplek Cemara Asri. Mereka berbondong-bondong antri pada TPS-TPS, sebagian dari TPS belum usai di laksanakan sehingga pada pukul 13:45 WIB masih ada yang mengantri dan sibuk mencari satu-persatu nama mereka di setiap kertas yang di tempelkan oleh petugas. Padahal, seharusnya TPS sudah tutup pukul 13:00 WIB. Mereka juga sangat *militan* memperjuangkan suara mereka.

Dengan modal KTP mereka bersedia bersitegang, dan lama mengantri untuk dapat memilih. Dalam penghitungan suara, mereka juga melakukan sapu bersih, suara mereka bulat penuh untuk mendukung paslon nomor urut 2 DJOSS (Djarot Saiful Hidayat – Sihar P.H. Sitorus). Di beberapa TPS bahkan suara mereka 95% unggul untuk paslon nomor urut 2. Dahsyatnya, Komplek Cemara Asri lebih dikenal dengan tuan rumah keluarga H. Anif Shah, bahkan pada pukul 11:00 WIB keluarga dari paslon Musa Rajekshah datang untuk memilih di TPS 5. Hal yang tak terduga paslon ERAMAS tidak unggul di tanah mereka sendiri, melainkan paslon DJOSS yang memegang kekuasaan tertinggi di daerah Komplek Cemara Asri.<sup>51</sup>

Tidak heran dalam situasi saat ini anggota dari PDIP yang memiliki kekuasaan penuh di Komplek Cemara Asri yang didominasi oleh suku mayoritas penduduk etnis Tionghoa. Berbicara tentang sejarah, merayakan tahun baru imlek sempat dilarang pada masa kolonial Belanda. Pada masa kekuasaan Jepang di Indonesia ini, Imlek dijadikan hari libur resmi berdasarkan keputusan Osamu Seiri No. 26 tanggal 1 Agustus 1942. Pada masa kekuasaan “Saudara Tua

---

<sup>51</sup>Lutfhi Irfan, selaku ketua TPS 5, Komplek Cemara Asri, 27 Juni 2018.



(soekarno)” kita ini pula, warga Tionghoa dapat dengan leluasa merayakan Imlek. Berlanjut masa kemerdekaan. Imlek tetap dapat dirayakan secara bebas di tanah air selama masa pemerintahan Presiden Soekarno. Pada masa Orde Baru, perayaan implek mulai dibatasi meskipun tidak sama sekali dilarang. Alasannya berdasarkan Instruktur Presiden (Inpres) No. 14 Tahun 1967 adalah:

“Manifestasinya dapat menimbulkan pengaruh psikologis, mental dan moral yang kurang wajar terhadap warga negara Indonesia sehingga merupakan hambatan terhadap proses asimilasi”.

Kemudian Gus Dur yang semasa menjadi presiden memutuskan untuk mencabut Inpres nomor 14 Tahun 1967. Kemudian beliau melakukan hal itu tersebut dengan mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 6 Tahun 2000. Bersamaan dengan itu, Gus Dur kemudian menjadikan Imlek sebagai hari libur fakultas pada setiap kampus-kampus atau instansi lainnya (berlaku bagi mereka yang merayakannya). Penerus Gus Dur, mantan Presiden Megawati Soekarnoputri, kemudian meresmikan Imlek sebagai hari libur Nasional pada Tahun 2002, yang mulai berlaku 2003.

Kebijakan-kebijakan yang dilakukan Gus Dur pada masa menjabat ketika menjadi presiden<sup>52</sup>, yaitu:

1. Menjadikan tahun baru Implek menjadi hari Libur
2. Menjadikan Kong Hu Cu agama yang di Akui
3. Berusaha menghapus Diskriminasi terhadap PKI
4. Merawat paham kebangsaan di tubuh NU
5. Sejahterakan PNS

---

<sup>52</sup>Abdulrahman wahid (Gus Dur)Kebijakan-kebijakan pasca menjabat sebagai Presiden, 2000.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **C. Kesimpulan**

Intensitas partisipasi politik etnis Tionghoa dalam Pilkada Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2018 tidak tergolong kedalam kategori aktivis, karena tidak ada masyarakat etnis Tionghoa yang mencalonkan diri atau terlibat dalam hal menyangkut politik baik sebagai aktivis partai maupun aktivis masyarakat istilahnya disebut dengan Gladiator. Masyarakat etnis Tionghoa di Komplek Cemara Asri, mereka tidak banyak mengetahui tentang politik, karena minimnya Ilmu pengetahuan dan alasan lain membuat mereka tidak terlalu menyukai berbau hal bersifat politik. Kebanyakan dari mereka menjadi Pembisnis yang handal dan hanya Sedikit dari mereka yang menyukai perpolitikan di Indonesia. Masyarakat Komplek Cemara Asri mayoritas etnis Tionghoa, sebagian kecil dari mereka bersuku Melayu, Aceh, Mandailing, Padang, Jawa, dan masih banyak lagi yang tak bisa disebutkan satu persatu. Karena di Komplek Cemara Asri banyak beragam jenis suku didalamnya.

Masyarakat etnis Tionghoa sebagian besar hanya sebagai Pengamat, baik dari televisi, Medsos dan media lainnya. menadalam pilkada kemarin dengan alasan bahwa dibutuhkannya pengetahuan yang baik tentang berbagai bidang agar dapat mencalonkan diri dan juga adanya anggapan bahwa politik itu adalah sesuatu yang kejam, selanjutnya intensitas partisipasi politik etnis Tionghoa juga tidak tergolong kedalam kategori partisipan, karena belum ditemukannya masyarakat etnis Tionghoa yang menjadi juru kampanye salah satu pasangan calon ataupun aktif di dalam parpol. Adapun peneliti menemukan masyarakat Tionghoa yang aktif didalam suatu komunitas namun tidak dapat digolongkan kedalam kategori partisipan dikarenakan komunitas tersebut tidak ada kaitannya dengan politik maupun pilkada.

Intensitas partisipasi politik masyarakat etnis Tionghoa dalam Pilkada Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2018, rata-rata tergolong ke dalam kategori pengamat, hal ini karena berdasarkan hasil penelitian rata-rata

masyarakat etnis Tionghoa yang berlatar belakang sebagai Wirausahawan dan Pembisnis. Mereka hanya menggunakan hak pilihnya pada pilkada 2018. Berdasarkan data dari KPU Desa Sampali, Suara terbanyak terpilih di Komplek Cemara Asri adalah nomor urut II, yaitu Paslon Djarot Saiful Hidayat- Sihar P.H. Sitorus dengan angka pantastis mengalahkan tuan pemilik Cemara Asri. Pada tahun periode 2018-2023 Paslon No urut 2 memperoleh suara di TPS 5 dengan perolehan 135% sementara Edy Rahmayadi- Musa Rajekshah hanya memperoleh 75%, TPS 6 DJOSS memperoleh suara 158%, ERAMAS hanya 79%, TPS 7 DJOSS memperoleh suara 124%, ERAMAS 77%, dan terakhir TPS 8 DJOSS memperoleh suara 146%, sementara ERAMAS hanya 82%. Masyarakat di kelurahan Desa Sampali, Komplek Cemara Asri yang merupakan wilayah mayoritas etnis Tionghoa

Alasan masyarakat etnis Tionghoa di Komplek Cemara Asri menggunakan hak pilihnya pada pilkada tahun 2018 adalah bahwa adanya harapan agar pemimpin yang mereka pilih kelak dapat membawa perubahan bagi masyarakat Sumatera Utara khususnya Medan. Selain itu karena hal tersebut merupakan suatu kewajiban bagi mereka sebagai warga negara Indonesia. Adapun masyarakat etnis Tionghoa di Komplek Cemara Asri yang tidak menggunakan hak pilihnya karena adanya alasan pribadi, sebagian dari mereka tidak mendapatkan hak pilih KPT(Kartu Pemilih Tetap) dan juga anggapan bahwa satu suara mereka tidak akan mempengaruhi hasil dari pilkada itu sendiri.

Beberapa Masyarakat etnis Tionghoa di Komplek Cemara Asri juga mengikuti perkembangan berita politik melalui Televisi, Surat Kabar, Radio, dan MedSos. Sebagian dari mereka bersifat Apatis. Jika dilihat dari setiap Masyarakat tersebut ada yang bersifat ikut-ikutan atau hanya sekadar meramaikan Panggung Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur saja. Ada Masyarakat yang bersifat rasa pingin tau dengan alasan bahwa hal tersebut merupakan peristiwa politik yang terjadi di daerah mereka sehingga menarik untuk diikuti, dan secara tidak langsung iklan politik berupa *banner* dan baliho dari pasangan calon yang terpasang selama pilkada turut mempengaruhi minat masyarakat etnis Tionghoa dalam mengikuti pemberitaan

terkait pilkada. Sejauh ini belum di temukannya masyarakat etnis Tionghoa khususnya di Komplek Cemara Asri yang ikut atau menghadiri kampanye dan bersifat partisipan maupun Aktivis. Jika di tanya mengapa anda tidak terjun langsung atau bergelut menjadi salah satu Aktivis mereka berdalih dengan alasan kesibukan, ketidak tarikan dalam Parpol dan adanya rasa takut dari masyarakat Tionghoa bahwa kegiatan politik seperti kampanye rawan akan terjadinya bentrokan, baik antar suku maupun kelompok yang berakibatkan rusaknya reputasi keturunan mereka.

**KESIMPULAN:** Intensitas partisipasi politik masyarakat etnis Tionghoa di Komplek Cemara Asri sebagian tergolong ke dalam kategori Apolitik, ada yang bersifat Apatis, spektator, dan sebagai Pengamat. Mereka lebih banyak sebagai pengamat tanpa melakukan perubahan yang menimbulkan hal positif untuk Sumatera Utara khususnya Kota Medan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah harus lebih memperhatikan mengenai intensitas partisipasi politik masyarakat minoritas seperti etnis Tionghoa yang ada di Desa Sampali (Komplek Cemara Asri), dalam hal ini pemerintah harusnya dapat memberikan sosialisasi mengenai pentingnya keterlibatan kaum minoritas sebagai bagian dari warna negara Indonesia agar dapat lebih berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan politik.
2. Partai politik sebagai sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik, dan sarana pendidikan politik harus lebih memperhitungkan keterlibatan kaum minoritas seperti etnis Tionghoa di dalam berbagai kegiatan partai politik karena dengan hal tersebut maka aspirasi dari kaum minoritas juga dapat tersalurkan dengan baik.
3. Masyarakat etnis Tionghoa di Desa Sampali (Komplek Cemara Asri) harus lebih peduli terhadap aktivitas politik yang terjadi di sekitarnya sehingga

diharapkan pada pilkada mendatang dapat meningkatkan intensitas partisipasi politik mereka baik di tingkat lokal maupun nasional.

### C. DAFTAR PUSTAKA

- D. Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 292
- E. Merriam Budardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002, h. 8
- F. Berdasarkan data dari Komplek Cemara Asri, di Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan, tahun 2017.
- G. Berdasarkan data dari Komplek Cemara Asri, di Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan, tahun 2018.
- H. C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2000. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Penerbit PT Rineka Cipta : Jakarta.
- I. Soehamo, 2004, dalam Merieam Budiardjo, dasa-dasar ilmu Politi, PT Gramedia pustaka Utama,1995. h. 2004: 102
- J. David F. Roth Dan Frank L. Wilson, the comparative study of politics (1976) Dr. Damsar, pengantar sosiologi Politik, jakarta: kencana prenada media group, 2010, ibid hal 183.
- K. Douglas A. Hibbs, dalam Ramlan Surbakti, Pegantar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia,1992. h. 143
- L. Fadillah putra, dan Yongki Sapito, *Perilaku Politik*, Gramedia pustaka,2012. H.10.
- M. Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta : Grasindo.,1999) hlm. 15-16
- N. G.W Alport dalam Bukunya (Tri Rusmi Widayatun), pengantar ilmu politik,1999, H, 218
- O. Rahmat, Jalaluddin, *metode komunikasi, bandung: remaja rosdakarya*, 1992, H 39
- P. Twang Peck Yang, *Elite Bisnis Cina di Indonesia dan Masa Transisi Kemerdekaan 1940-1950*. Yogyakarta: Niagara, 2004, hal. 27.
- Q. Hari Poerwanto, *Orang Cina Khek dari Singkawang*. Jakarta: Komunitas Bambu, 2005, hal. 40.

- R. Charles A. Coppel, *Tionghoa Indonesia Dalam Krisis*. Jakarta: Sinar Harapan, hal. 21.
- S. Berdasarkan data dari Komplek Cemara Asri, di Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan, tahun 2017.
- T. Berdasarkan data dari Komplek Cemara Asri, di Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan, tahun 2018.

### **DAFTAR WAWANCARA**

- A. Ditujukan Pada Masyarakat Tionghoa
  - 1. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang politik di Indonesia? (bagaimana tanggapannya)
  - 2. Apakah bapak/ibu sering mendengarkan berita-berita politik di media? (media apa yang sering digunakan?)
  - 3. Menurut bapak/ibu apakah program yang dibuat partai politik sesuai dengan apa yang bapak/ibu inginkan? (misalnya program partai X mensejahterakan rakyat dan sebagainya)
  - 4. Apakah bapak/ibu ikut serta dalam memberikan hak suara dalam setiap pemilu, baik Pilkada atau Pilpres (kalau tidak apa alasanya)
  - 5. Sejak kapan bapak/ibu merasa kebebasan dalam politik di daerah ini lebih terfasilitasi atau merasa berbeda dengan masa-masa sebelumnya?
  - 6. Apakah bapak/ibu tergabung dalam organisasi yang bersifat politik seperti partai politik?(jika YA apa yang menjadi alasanya, jika TIDAK apa yang menjadi

alasanya, Misal: saya tidak bergabung dalam kelompok politik karena tidak ada yang memfasilitasi atau melakukan rekrutmen atau pengkaderan)

7. Apa kedudukan bapak/ibu di dalam organisasi tersebut? (jika pertanyaan no 3 YA)
8. Apakah bapak/ibu pernah ikut serta dalam kampanye politik? (menghadiri, mendatangi, atau menjadi bagian dalam pelaksanaan kampanye)
9. Apakah bapak/ibu menjadi pendukung salah satu partai politik atau mendukung calon kepala daerah, presiden atau sebagainya?
10. Pernahkah bapak/ibu membicarakan politik, negara atau pemerintahan dengan masyarakat sekitar atau dengan kelompok tertentu (organisasi masyarakat) atau dengan pemerintahan seperti lurah, ketua RT/RW, aparatur pemerintahan (PNS)?
11. Pernahkah bapak/ibu berbicara dengan pejabat partai atau pemerintahan (kepala daerah)?
12. Apakah bapak/ibu pernah berdemonstrasi dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah?
13. Bagaimana sikap bapak/ibu terhadap pemerintah jika hal-hal yang dianggap kurang sesuai dengan keinginan bapak/ibu? (misalnya: fasilitas jalan rusak, sering mati lampu, naiknya harga BBM, dan lain sebagainya)
14. Bagaimana bapak/ibu menyampaikan aspirasi kepada pemerintah?
15. Apakah bapak/ibu merasa sudah tercukupi apa yang telah dilakukan pemerintah?
16. Apa harapan bapak/ibu untuk Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023?

B. Ditujukan Pada Lurah, RT/RW Atau Aparatur Kelurahan, Aparatu kecamatan

1. Menurut Bapak berapa jumlah penduduk etnis Tionghoa yang ada di wilayah Bapak?
2. Sejak kapan masyarakat Tionghoa tinggal di wilayah bapak, apakah ada peningkatan di setiap tahunnya?
3. Bagaiman kehidupan masyarakat Tionghoa yang ada di wilayah bapak?



4. Apakah ada etnis Tionghoa yang berpegang pada agama Islam? (berapa jumlahnya)
5. Menurut Bapak apakah masyarakat Tionghoa sering terlibat dalam kegiatan politik? (cenderung apatis atau sebaliknya)
6. Menurut Bapak apakah masyarakat Tionghoa berkonflik dengan warga sekitar atau antar kalangan mereka sendiri?
7. Menurut Bapak apakah orang-orang Tionghoa memiliki koneksi atau hubungan dengan pejabat pemerintahan ?
8. Bagaimana sistem pemilihan Pilkada di Komplek Cemara Asri?
9. Berapa jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) di Komplek Cemara Asri?
10. Apa harapan bapak untuk Pilkada 2018 ini?

C. Ditujukan Pada Masyarakat Sekitar (Muslim)

1. Bagaimana tanggapan bapak/ibu tentang keberadaan masyarakat Tionghoa yang tinggal di Sekitar wilayah bapak/ibu?
2. Bagaimana tanggapan bapak/ibu jika orang-orang Tionghoa terlibat dalam politik?
3. Apakah pernah bapak/ibu dipengaruhi atau sebaliknya orang-orang Tionghoa dalam memilih calon kepala daerah dalam Pilkada?
4. Apakah masyarakat Tionghoa sering mengadakan acara kegiatan yang berhubungan dengan politik?
5. Apakah pernah bapak/ibu berbicara tentang politik dengan orang-orang Tionghoa?
6. Apa harapan bapak/ibu dalam Pilkada 2018 ini?

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **I. Identitas Diri**

Nama : Nurul Qamariah  
Tempat/Tanggal Lahir : Kutacane/14 September 1994  
NIM : 44144029  
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Studi Islam  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jln. Ileng Lingkungan. 1 gang Mushola, Kec.  
Medan Marelan

### **II. Orang Tuan**

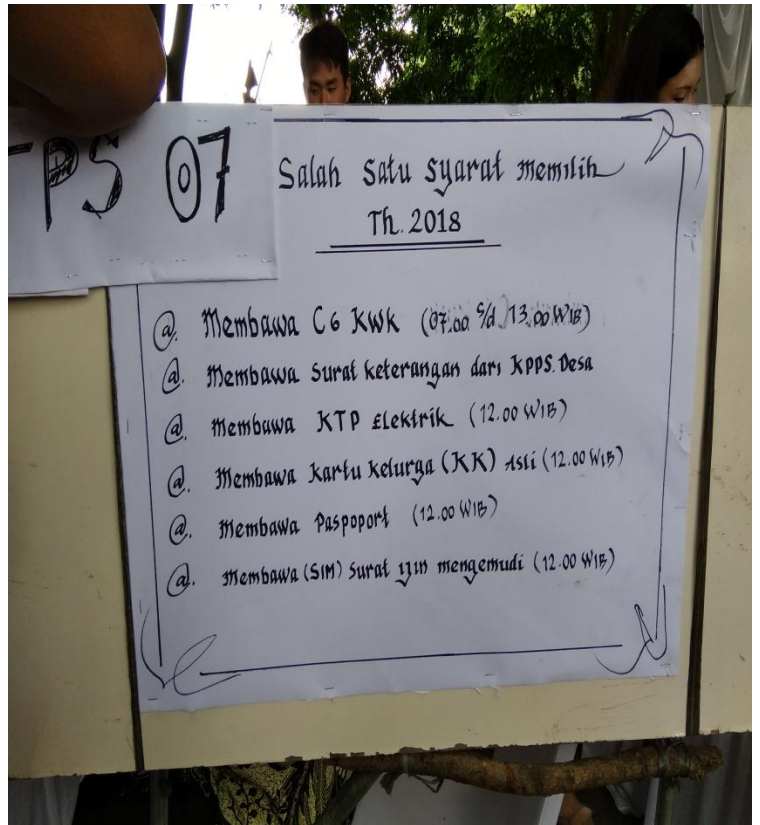
Nama Ayah : Muhammad Samin  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Nama Ibu : Jaminah  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga

### **III. PENDIDIKAN**

Tahun 2000 – 2006 : SD N 067266 Medan  
Tahun 2006 – 2009 : MTS Proyek Kandepag Medan  
Tahun 2009 – 2012 : SMA Negeri 9 MEDAN  
Tahun 2014-2018 : SI Jurusan PPI Di Fakultas Ushuluddin Dan Studi  
Islam UIN SU Medan



No.	No. KK	NIK	Nama	Tanggal Lahir	Usia	Sex	Relig.	Pendidikan	Tempat Lahir	Alamat	RT	Rw	Distrik	Kecamatan
1	120726100001	120726100001	MUSA AR-RANUDHIN	28/11/1984	38	M	I	S	CEMPAKA BELUK	XX	XX	XX	XX	XX
2	120726100002	120726100002	ADIAN PELUK LEE	27/11/2000	17	M	I	S	AL. SEMANGUN	XX	XX	XX	XX	XX
3	120726100003	120726100003	JOHANNA	28/08/1971	46	P	I	S	AL. KASCA BELUK	XX	XX	XX	XX	XX
4	120726100004	12072611174	YANI	01/11/1974	43	P	I	S	AL. SAMUDRA	XX	XX	XX	XX	XX
5	120726100005	120726100005	JENNY	28/08/1984	33	S	I	S	AL. CEMARA	XX	XX	XX	XX	XX
6	120726100006	120726100006	UNLUNG RINDY	05/08/1972	45	S	I	S	AL. PANGKUTAN	XX	XX	XX	XX	XX
7	120726100007	120726100007	SUSI IRWATI	16/08/1981	37	S	I	S	AL. PANGKUTAN	XX	XX	XX	XX	XX
8	120726100008	120726100008	TANFON RIE	15/08/1984	33	S	I	S	AL. PANGKUTAN	XX	XX	XX	XX	XX
9	120726100009	120726100009	GRANI	17/03/1991	27	M	I	S	AL. PANGKUTAN	XX	XX	XX	XX	XX
10	120726100010	120726100010	M. ARIFIN	15/07/1985	32	M	I	S	AL. PANGKUTAN	XX	XX	XX	XX	XX
11	120726100011	120726100011	WILIANA	07/01/1980	38	S	I	S	AL. ELANG BELUK	XX	XX	XX	XX	XX
12	120726100012	120726100012	ANGELA CUACA	20/01/1989	29	M	I	S	AL. ELANG BELUK	XX	XX	XX	XX	XX
13	120726100013	120726100013	REVALIA CUACA	24/08/1991	27	M	I	S	AL. ELANG BELUK	XX	XX	XX	XX	XX
14	120726100014	120726100014	TAJA HOKI	08/02/1983	35	M	I	S	AL. ELANG BELUK	XX	XX	XX	XX	XX
15	120726100015	120726100015	SIWAN	15/08/1983	35	M	I	S	AL. ELANG BELUK	XX	XX	XX	XX	XX
16	120726100016	120726100016	PERRYANTO	28/02/1991	27	M	I	S	AL. ELANG BELUK	XX	XX	XX	XX	XX







## DAFTAR PASANGAN CALON PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2018

**1**



CALON GUBERNUR  
**EDY RAHMAYADI**

CALON WAKIL GUBERNUR  
**MUSA RAJEKSHAH**

**2**



CALON GUBERNUR  
**BURIT SAPULOHAT**

CALON WAKIL GUBERNUR  
**SIHAR P.H. SITORUS**

### VISI DAN MISI

**VISI:**  
SUMUT MAJU, AMAN, SEJAHTERA & BERMARTABAT

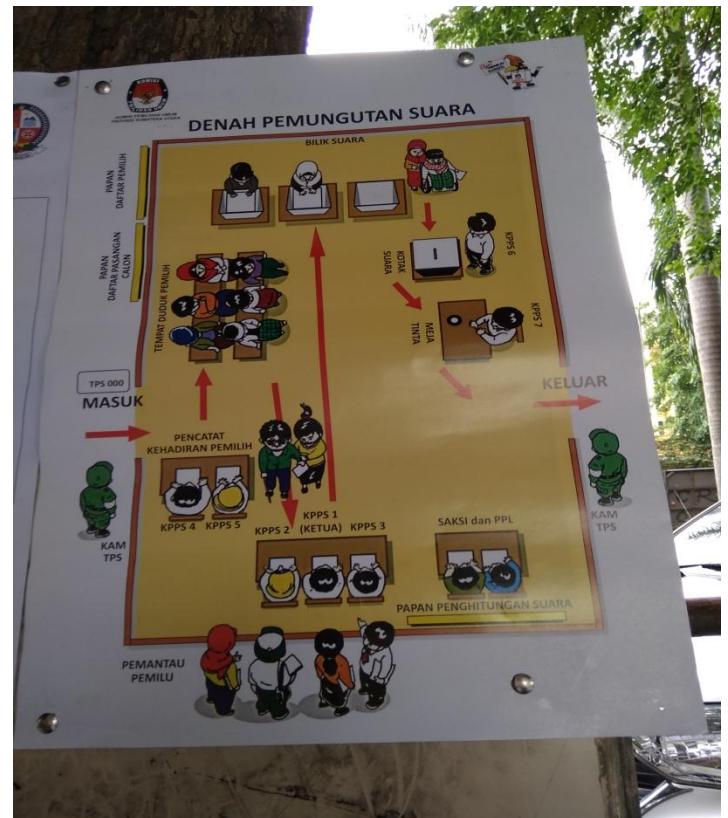
**MISI:**

1. MENGURANGI PENGANGGURAN, MENINGKATKAN IKLIM INVESTASI SUMUT
2. MEMPERLUAS, MEMPERBAIKI INFRASTRUKTUR UNTUK Mendukung Pembangunan SUMUT
3. MEMPERKUAT SISTEM PENDIDIKAN
4. MENINGKATKAN KUALITAS KESEHATAN MASYARAKAT SUMUT
5. MENINGKATKAN DAYA SAING PRODUKTIVITAS PETANI DAN NELAYAN UNTUK MEWUJUDKAN KEDAULATAN PANGAN

### VISI DAN MISI

**PROGRAM - PROGRAM UNGULAN**

1. KARTU SUMUT PINTAR (KSP)
2. KARTU SUMUT SEHAT (KSS)
3. KARTU SUMUT KELUARGA SEJAHTERA (KSKS)
4. REFORMASI BIROKRASI, TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH BEBAS DARI KORUPSI
5. PELAYANAN PUBLIK YANG MUDAH DAN TRANSPARAN
6. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SERTA MENDORONG ACEPERACATAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL











VISI DAN MISI		VISI DAN MISI	
SUMUT MAJU, AMAN, SEJAHTERA & BERMARTABAT		PROGRAM - PROGRAM UNDUGULAN	
MISI:		1. KARTU SUMUT PINTAR (KSP)	
1. MENGURANGI PENGANGGURAN, MENINGKATKAN IKUM		2. KARTU SUMUT SEHAT (KSS)	
2. MENINGKATKAN PEMANGGUPAN SUMUT		3. KARTU SUMUT KELUARGA SEJAHTERA (KSKS)	
3. MENINGKATKAN KUALITAS KESEHATAN MASYARAKAT		4. REFORMASI BIROKRASI, TATA KELOLA PEMERINTAHAN	
4. MENINGKATKAN DAYA SAING PRODUKTIVITAS PETANI DAN		5. PELAYANAN PUBLIK YANG MUDAH DAN TRANSPARAN	
5. MENINGKATKAN KUALITAS KESEHATAN MASYARAKAT		6. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SERTA MENDONGONG	
NELAYAN UNTUK MENYUKUN KEDULATAN PANGAN		PERCEPATAN PROYER STRATEGIS NASIONAL	





